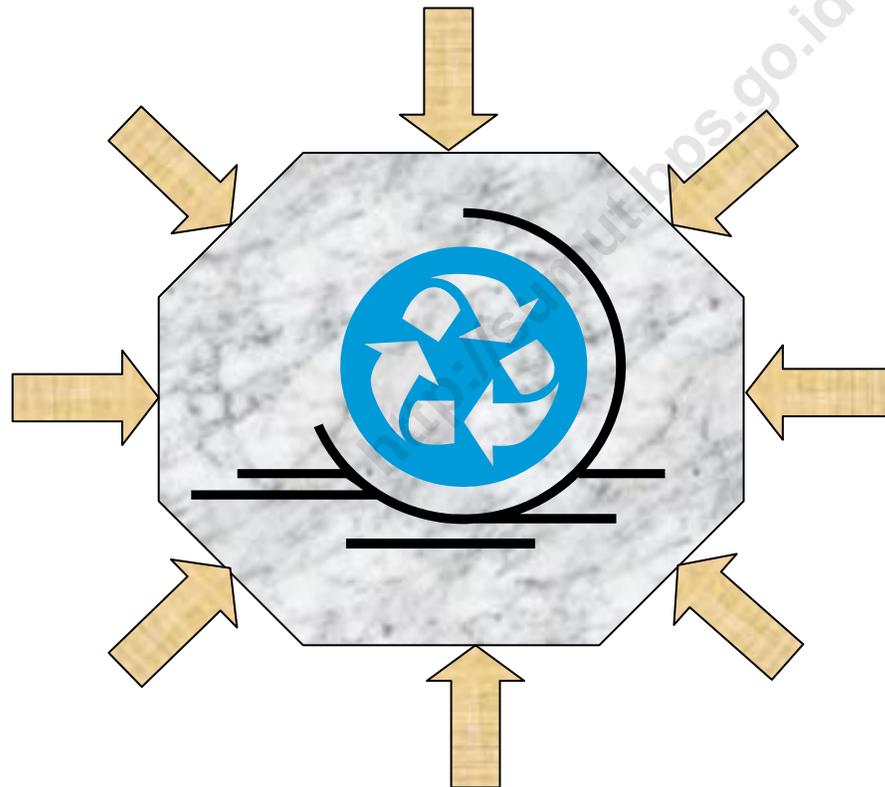




ISBN : 979.467.339.0
No. Katalog : 4701.12

PENYUSUNAN DAN ANALISIS INDIKATOR KUANTITATIF PROGRAM PRIORITAS KABINET INDONESIA BERSATU



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Katalog BPS : 4701.12

**PENYUSUNAN DAN ANALISIS INDIKATOR KUANTITATIF PROGRAM PRIORITAS
KABINET INDONESIA BERSATU**

ISBN : 979.467.339.0

Nomor Publikasi : 12520.04.06

Ukuran Buku : 16 x 21,5 cm

Jumlah Halaman : ix + 53 lembar

Naskah : Bidang Statistik Sosial

Penyunting : Ir. Sukardi, MSi

Penulis : Marine Sohadi Angkat, M.Si

Pengolah Data : Kresna Putra Utama Siregar

Gambar Kulit : Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Sumber Dana : APBD Provinsi Sumatera Utara T.A 2006

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Pembangunan masyarakat Indonesia secara umum, dan masyarakat Sumatera Utara khususnya, merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Dan amanat itu pulalah yang menjadi fondasi *visi* dan *misinya* pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Sumut yang bertindak sebagai subjek dan objek pembangunan itu sendiri.

Untuk melihat, memantau, mengevaluasi, dan mengkaji bagaimana kinerja pelaksanaan pembangunan di Sumut, diperlukan indikator-indikator kuantitatif yang terukur dan akuntabel, yang secara khusus disajikan dalam bahan paparan ini. Indikator-indikator tersebut adalah indikator yang terkait dengan 7 (tujuh) program prioritas pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yaitu pengentasan kemiskinan, penekanan tingkat pengangguran, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan level dan kualitas pendidikan, peningkatan infrastruktur, penciptaan good governance, dan peningkatan pelayanan publik (*public service*).

Selain angka-angka realisasi, dalam paparan ini juga disajikan angka-angka prediksi untuk 5 (lima) tahun ke depan, terutama indikator-indikator yang terkait dengan ketujuh program pemerintahan KIB. Hal ini dilakukan oleh BPS Provinsi Sumatera Utara dalam rangka sumbang pemikiran kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mempersiapkan “bahan baku” perencanaan pembangunan.

Disadari sepenuhnya bahwa angka-angka prediksi tersebut didasarkan pada data historis dan penerapan model-model statistik yang berlandas pada asumsi-asumsi. Oleh karena itu, agar pencapaian target pembangunan di Sumut lebih realistis, kontribusi pemikiran dari dinas / instansi terkait sangat diharapkan demi untuk

terwujudnya angka "*banchmark*" sebagai rujukan bersama dalam melaksanakan pembangunan sektoral dan lintas sektoral di wilayah Sumut selama kurun waktu 2005 – 2009. Khusus untuk indikator-indikator yang terkait dengan good governance dan public service, BPS Provinsi Sumatera Utara belum dapat mengidentifikasinya secara eksplisit.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya bahan-bahan yang kami sajikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Medan, Desember 2006
Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Utara
Kepala,



H. M. Nasir Syarbaini, S.E
NIP. 340003769

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
Bab I KEMISKINAN	1
Bab II PENGANGGURAN.....	9
Bab III KESEHATAN	14
Bab IV PENDIDIKAN	23
Bab V INFRASTRUKTUR	31
Bab VI KINERJA PEREKONOMIAN.....	42
KONDISI MAKRO SOSIAL EKONOMI PROVINSI SUMATERA UTARA 2003-2004 DAN KONDISI YANG DIHARAPKAN 2005-2010.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004, 2006 (Dala ribuan).....	7
Tabel 1.2	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004, 2006	8
Tabel 2.1	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2004-2006	15
Tabel 2.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk 15 Tahun Keatas dengan Konsep Baru Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Tahun 2000-2004.....	8
Tabel 3.1	Persentase Balita (0-59 Bulan) Menurut Status Gizi dan Kabupaten/Kota 2003, 2005	23
Tabel 3.2	Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004-2005	24
Tabel 3.3	Angka Kematian Bayi (IMR) di Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004-2005	25
Tabel 3.4	Angka Harapan Hidup (e_0) di Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004-2005	26
Tabel 4.1	Persentase Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Provinsi Sumatera Utara 2001-2005	33
Tabel 4.2	Persentase Penduduk 10 + Yang Buta Huruf Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur 2001-2005	34
Tabel 5.1	Panjang Jalan Menurut Status, Jenis Permukaan dan Kondisi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 (Km)	42
Tabel 5.2	Panjang Jalan Menurut Status, dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 (Km)	43

Tabel 6.1	Indikator Makro Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2004-2005	49
Tabel 6.2	Indikator Perdagangan Luar Negeri, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Inflasi Sumatera Utara 2004-2005	50

<http://sumut.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.a	Persentase Penduduk Bekerja dan Mencari Kerja Agustus 2006	13
Grafik 2.1.b	Persentase Penduduk Bekerja dan Mencari Kerja Agustus 2006	14
Grafik 3.1	Persentase Balita (0-59 Bulan) Menurut Status Gizi dan Kabupaten/Kota 2005	19
Grafik 3.2	Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004-2005	20
Grafik 3.3	Angka Kematian Bayi (IMR) di Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004-2005	21
Grafik 3.4	Angka Harapan Hidup (e_0) di Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004-2005	22
Grafik 4.1	Persentase Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur Provinsi Sumatera Utara 2001-2005	30
Grafik 4.2	Persentase Penduduk 10 + Yang Buta Huruf Provinsi Sumatera Utara Menurut Jenis Kelamin 2001-2005	31
Grafik 4.3	Persentase Penduduk 10 + Yang Buta Huruf Provinsi Sumatera Utara Menurut Kelompok Umur 2001-2005	32
Grafik 5.1	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 (Km)	39
Grafik 5.2	Panjang Jalan Menurut Jenis Status di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 (Km)	40
Grafik 5.3	Panjang Jalan Menurut Kondisi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 (Km)	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Ketenagakerjaan	10
------------	-------------------------------	----

<http://sumut.bps.go.id>

1.1. Garis Kemiskinan Pengeluaran/Konsumsi

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini menggunakan konsep kemiskinan yang dikaitkan kebutuhan hidup minimal yang layak (*basic needs*) untuk seseorang/rumahtangga. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun non pangan yang bersifat mendasar untuk pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Berdasarkan pendekatan *basic needs*, maka dapat dihitung "garis kemiskinan konsumsi" dan selanjutnya dapat dihitung persentase penduduk miskin (*Head Count Index*), yaitu persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan konsumsi. Garis kemiskinan konsumsi dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan bukan makanan per kapita pada kelompok penduduk referensi, yaitu penduduk kelas marjinal yang hidupnya berada sedikit diatas garis kemiskinan konsumsi. Garis kemiskinan konsumsi terdiri dari garis kemiskinan makanan (batas kecukupan konsumsi makanan) dan garis kemiskinan non-makanan (batas kecukupan konsumsi non-makanan).

Batas kecukupan konsumsi makanan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk makanan yang memenuhi kebutuhan minimum energi 2100 kalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Wydia Pangan dan Gizi (1978). Sejak tahun 1993 penghitungan kecukupan kalori didasarkan pada 52 komoditi makanan terpilih yang telah disesuaikan dengan pola konsumsi, hasil Survei Paket Komoditi

Kebutuhan Dasar (SPKKD) tahun 1993 dan 1996. Paket komoditi makanan setelah 1996 dievaluasi perkembangannya untuk tahun-tahun setelah 1996.

Batas kecukupan konsumsi non-makanan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi untuk memenuhi kebutuhan minimum non-makanan, seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan dasar non-makanan lainnya. Pemilihan jenis konsumsi non-makanan mengalami perkembangan dari satu periode ke periode lainnya. Pada periode sebelum tahun 1993, jumlah jenis konsumsi non-makanan terpilih terdiri dari 14 jenis untuk perkotaan dan 12 jenis untuk pedesaan; sedangkan pada periode sejak tahun 1996 (Hasil SPKKD, 1996), jumlah jenis konsumsi non-makanan terpilih terdiri dari 51 jenis untuk perkotaan dan 47 jenis untuk pedesaan.

1.2. Perubahan Garis Kemiskinan Februari 2005-Maret 2006 (Nasional)

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Semakin tinggi Garis Kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin.

Selama Februari 2005-Maret 2006, Garis Kemiskinan naik sebesar 18,39 persen, yaitu dari Rp.129.108,-per kapita per bulan pada Februari 2005 menjadi Rp.152.847,- per kapita per bulan pada Maret 2006. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Februari 2005, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 70,54 persen, tetapi pada bulan Maret 2006, peranannya meningkat sampai 74,99 persen. Meningkatnya peranan GKM terhadap GK ini sebagian besar akibat naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok yang juga digambarkan oleh inflasi

umum sebesar 17,95 persen selama periode Februari 2005-Maret 2006.

Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada bulan Maret 2006, persentase pengeluaran beras terhadap total pengeluaran sebulan untuk penduduk miskin sebesar 23,10 persen, bahkan di daerah perdesaan persentase ini mencapai 26,08 persen. Sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan mencapai 34,91 persen di perdesaan dan 25,98 persen di perkotaan. Dengan demikian kenaikan harga beras akan berpengaruh besar kepada penduduk miskin. Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan adalah gula pasir (4,66 persen di perdesaan, 3,88 persen di perkotaan), minyak kelapa (2,47 persen di perdesaan, 1,98 persen di perkotaan), telur (1,81 persen di perdesaan, 2,70 persen di perkotaan), dan mie instant (2,01 persen di perdesaan, 2,14 persen di perkotaan).

Untuk komoditi bukan makanan, biaya perumahan mempunyai peranan yang besar, yaitu 6,27 persen di perdesaan dan 6,54 persen di perkotaan. Biaya untuk listrik, angkutan dan minyak tanah mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk daerah perkotaan, yaitu masing-masing sebesar 3,60 persen, 3,20 persen dan 2,46 persen, sementara untuk daerah perdesaan pengaruhnya relatif kecil (kurang dari 2 persen).

1.3. Perkembangan jumlah penduduk miskin Sumatera Utara

Keadaan ekonomi yang masih belum membaik pada tahun 2006 berpengaruh pada meningkatnya jumlah penduduk miskin. Tahun 2004 jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mencapai 1,80 juta jiwa atau sekitar 14,93 persen dari total penduduk Sumatera Utara. Tahun 2006 angka ini mengalami peningkatan baik secara absolut maupun relatif yaitu mencapai sekitar 1,98 juta jiwa atau sekitar 15,66 persen dari total penduduk Sumatera Utara.

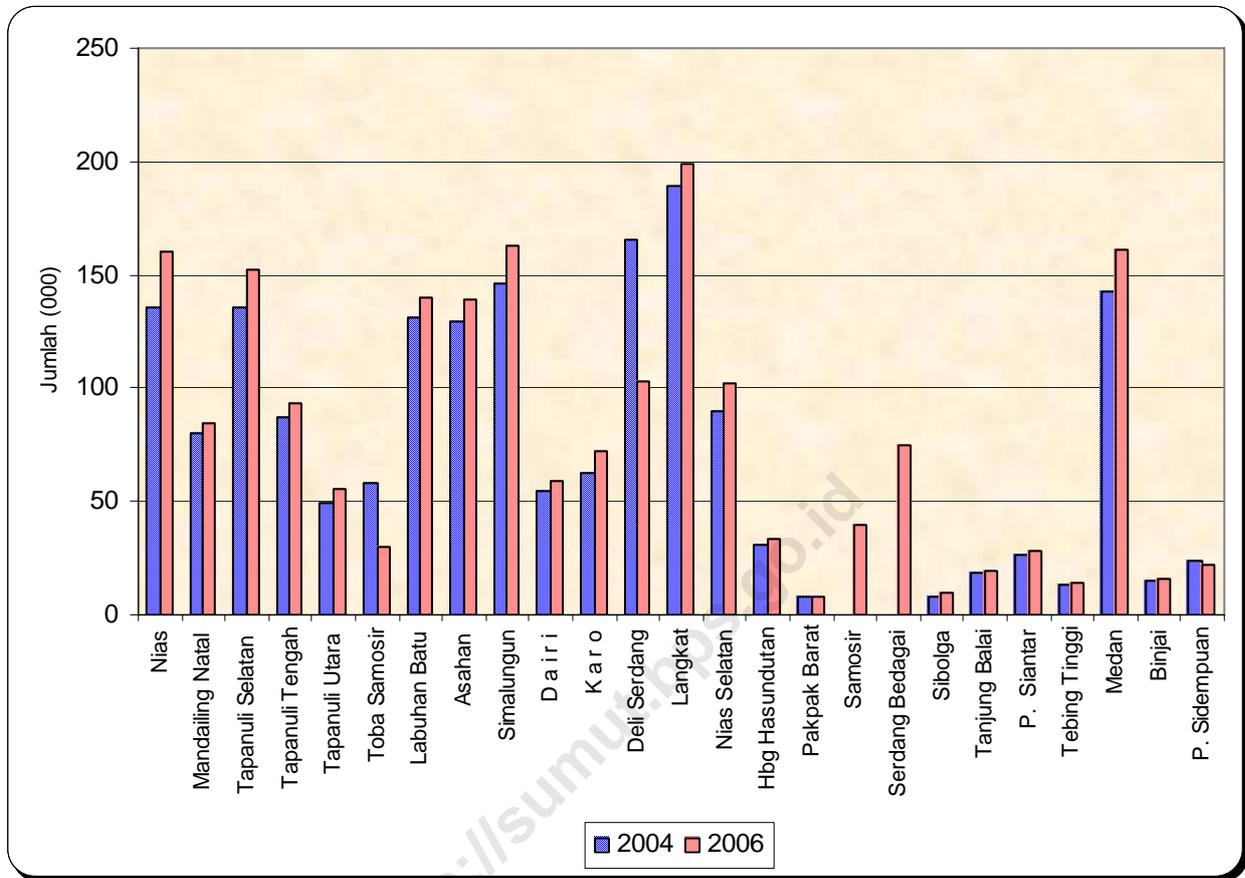
Penduduk miskin terbesar di Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Langkat dengan jumlah mencapai 199,24 ribu jiwa, diikuti oleh Kabupaten Simalungun

sebanyak 163,11 ribu jiwa dan Kota Medan sebanyak 160,65 ribu jiwa. Penduduk miskin dengan jumlah terkecil terdapat di Kabupaten Pakpak Bharat yang hanya 8,24 ribu jiwa, Kota Sibolga (9,28 ribu jiwa), dan Kota Tebing Tinggi (14,37 ribu jiwa).

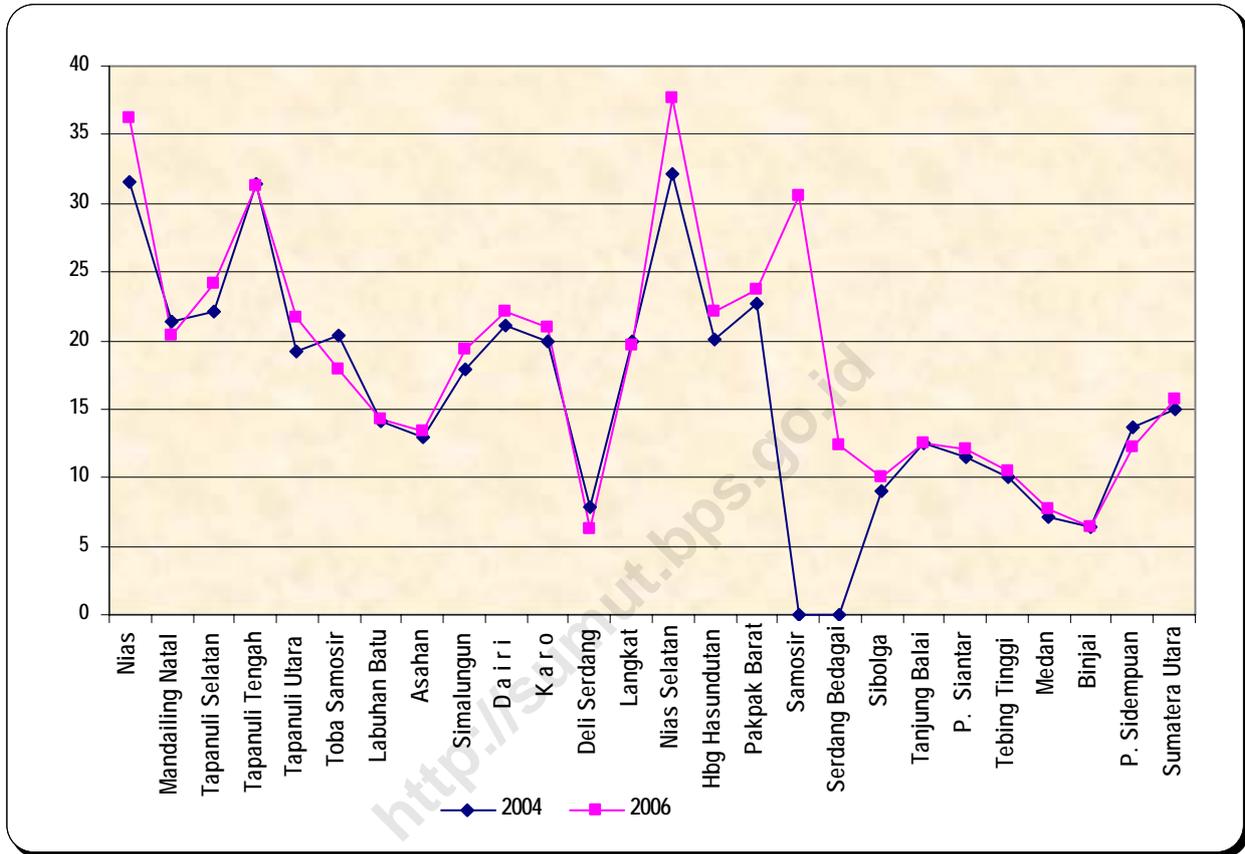
Secara relatif, persentase penduduk miskin tertinggi tahun 2006 terdapat di Kabupaten Nias Selatan, yaitu sebesar 37,66 persen, disusul dengan Kabupaten Nias (36,19 %) dan Kabupaten Tapanuli Tengah (31,26 %). Daerah yang memiliki persentase penduduk miskin terkecil adalah Kabupaten Deli Serdang hanya 6,29 persen, diikuti dengan Kota Binjai (6,38 %) dan Kota Medan (7,77%).

<http://sumut.bps.go.id>

Grafik 1. 1
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004, 2006



Grafik 1. 2
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004, 2006



Tabel 1.1.
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004, 2006
(Dalam Ribuan)

Kabupaten/Kota	2004	2006
[1]	[2]	[3]
01. Nias	135,8	159,982
02. Mandailing Natal	80,2	84,389
03. Tapanuli Selatan	135,5 ^{r)}	152,051
04. Tapanuli Tengah	87,1	93,091
05. Tapanuli Utara	48,9	55,721
06. Toba Samosir	58,4	30,183
07. Labuhan Batu	131,3	140,182
08. Asahan	129,6	138,936
09. Simalungun	146,3	163,113
10. D a i r i	54,6	59,295
11. K a r o	62,1	71,792
12. Deli Serdang	165,5	102,814
13. Langkat	189,2	199,237
14. Nias Selatan	90,2	102,072
15. Hbg Hasundutan	30,7	33,814
16. Pakpak Barat	7,7	8,244
17. Samosir	x	39,969
18. Serdang Bedagai	x	74,709
71. Sibolga	7,8	9,278
72. Tanjung Balai	18,6	19,58
73. P. Siantar	26,2	28,414
74. Tebing Tinggi	13,5	14,37
75. Medan	142,6	160,653
76. Binjai	14,7	15,593
77. P. Sidempuan	23,6 ^{r)}	22,218
SUMATERA UTARA	1.800,1	1.979,7

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Keterangan : x) Masih tergabung dengan kabupaten induk

^{r)} Angka Perbaikan

Tabel 1. 2
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004, 2006

Kabupaten/Kota	2004	2006
[1]	[2]	[3]
01. Nias	31,58	36,19
02. Mandailing Natal	21,31	20,40
03. Tapanuli Selatan	22,08	24,17
04. Tapanuli Tengah	31,47	31,26
05. Tapanuli Utara	19,16	21,73
06. Toba Samosir	20,37	17,85
07. Labuhan Batu	14,16	14,20
08. Asahan	12,91	13,38
09. Simalungun	17,94	19,39
10. D a i r i	21,16	22,16
11. K a r o	20,00	20,96
12. Deli Serdang	7,91	6,29
13. Langkat	19,89	19,65
14. Nias Selatan	32,15	37,66
15. Hbg Hasundutan	20,11	22,14
16. Pakpak Barat	22,62	23,67
17. Samosir	x	30,59
18. Serdang Bedagai	x	12,34
71. Sibolga	9,01	10,09
72. Tanjung Balai	12,53	12,51
73. P. Siantar	11,55	12,07
74. Tebing Tinggi	10,10	10,42
75. Medan	7,13	7,77
76. Binjai	6,40	6,38
77. P. Sidempuan	13,65	12,22
SUMATERA UTARA	14,93	15,66

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Keterangan : x) Masih tergabung dengan kabupaten induk

2

PENGANGGURAN

2.1. Komposisi Penduduk Usia Kerja

Badan Pusat Statistik menggunakan pendekatan angkatan kerja (*labor force approach*) dalam menentukan konsep atau definisi istilah-istilah ketenagakerjaan yang baku. Pendekatan ini membagi habis penduduk usia kerja (*working-age population*) dalam dua kategori besar yaitu angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja (*not in labor force*). Kelompok angkatan kerja terdiri mereka yang bekerja (*employed*) dan mereka tidak bekerja dan mencari pekerjaan (*unemployed*). Dalam kalimat terakhir kata sambung “dan” sangat penting karena mereka yang tidak bekerja tetapi juga tidak mencari pekerjaan digolongkan ke dalam bukan angkatan kerja. Komponen bukan angkatan kerja lainnya adalah mereka yang sekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya (penduduk usia lanjut, cacat, dsb).

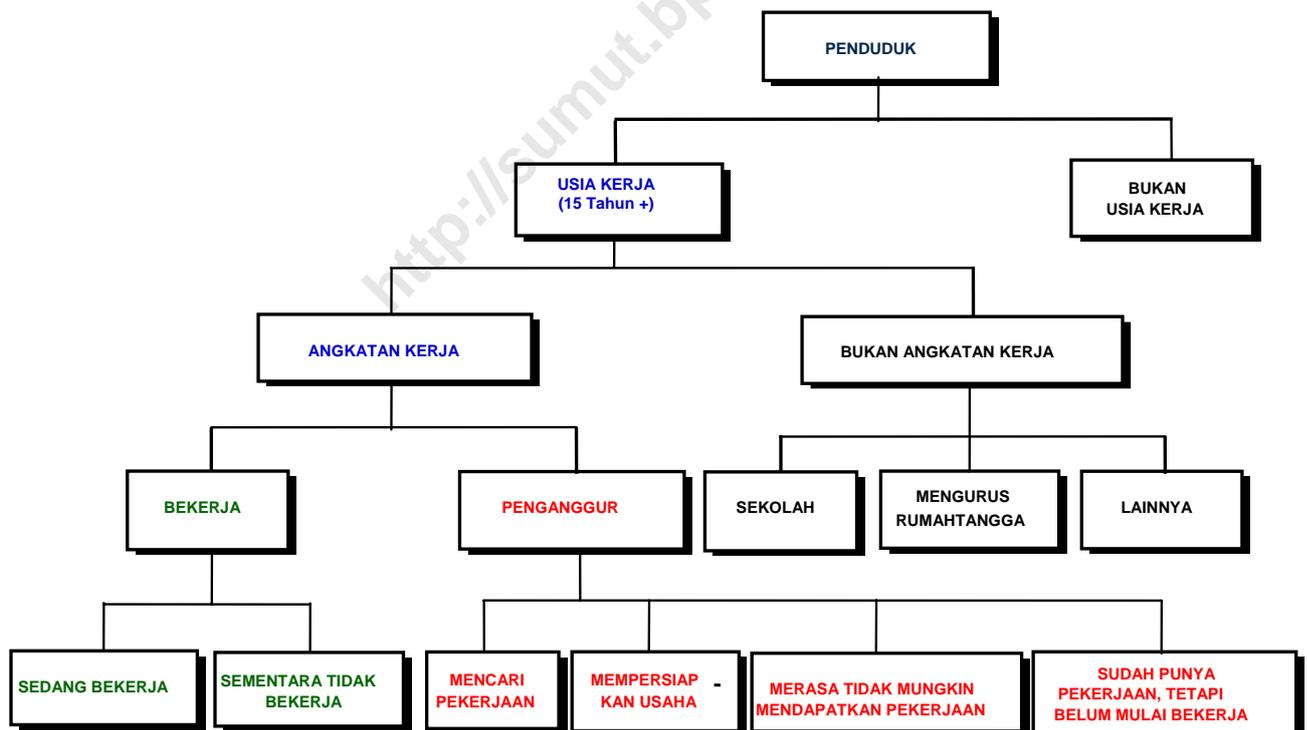
Pendekatan angkatan kerja memiliki beberapa aturan dasar atau azas yang perlu diikuti secara ketat dan konsisten. Pertama, azas eksklusivitas. Dengan azas ini seorang penduduk usia kerja hanya digolongkan dalam satu kategori dalam komposisi penduduk usia kerja itu. Seseorang yang dikategorikan bekerja, misalnya, tidak dimasukkan dalam kategori lainnya seperti sekolah, sekalipun orang itu dalam kenyataannya bekerja tetapi juga sekolah.

Kedua, azas prioritas. Dengan azas ini urutan prioritas kategori ditentukan secara pasti yaitu bekerja, mencari pekerjaan, sekolah, mengurus rumahtangga, dan lainnya. Jika, misalnya, seorang ibu rumahtangga sebagian besar waktunya digunakan untuk

mengurus rumahtangga tetapi dia secara aktual juga bekerja walaupun hanya satu jam, maka orang itu digolongkan sebagai penduduk bekerja. Seorang mahasiswa yang "nyambi" bekerja, juga dikategorikan sebagai bekerja sekalipun sebagian besar waktunya digunakan untuk kuliah.

Azas lainnya yang melekat dalam pendekatan angkatan kerja adalah bahwa dalam penentuan kategori ketenagakerjaan seorang didasarkan pada kegiatan sebenarnya dalam suatu rujukan periode waktu tertentu. Rujukan waktu tidak baku tetapi BPS, seperti dianut oleh banyak negara, menggunakan batasan seminggu terakhir sebagai rujukan waktu survei (*survei reference period*).

Gambar 2.1. Diagram Ketenagakerjaan



2.2. Dinamika Pengangguran Sumatera Utara

Situasi ketenagakerjaan di Sumatera Utara pada Agustus 2006 mulai menunjukkan arah yang lebih baik, jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2006. Walaupun angka pengangguran terbuka pada Agustus 2006 masih cukup tinggi, mencapai 11,51 persen tetapi jauh lebih rendah dibanding angka pada Februari 2006 sebesar 14,82 persen. Di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja berkurang 11 ribu orang menjadi 4,86 juta orang dibanding Februari 2006 sebesar 4,871 juta orang.

Pada Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Agustus 2006 sebanyak 8,209 juta orang, bertambah 57 ribu orang dibandingkan dengan keadaan Februari 2006. Sementara itu, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2006 mencapai 5,492 juta orang. Bila dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada Februari 2006 sebesar 5,718 juta, berarti terjadi pengurangan sebesar 226 ribu orang.

Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2006 sebanyak 4,860 juta orang, atau berkurang sebanyak 11 ribu orang dibandingkan penduduk yang bekerja pada Februari 2006. Disisi lain pencari kerja bulan Agustus 2006 sebanyak 632 ribu, berarti ada penurunan sebanyak 216 ribu orang dibanding dengan Februari 2006 sebanyak 848 ribu orang.

Menurunnya angka pencari kerja merupakan indikasi bahwa situasi perekonomian Sumatera Utara mulai membaik. Sampai dengan semester pertama tahun 2006 ekonomi tumbuh sebesar 4,27 persen. Peningkatan ini di dukung oleh stabilnya nilai tukar rupiah, dan tekanan inflasi akibat kenaikan BBM telah usai. Sampai dengan bulan Agustus 2006 inflasi kumulatif Sumatera Utara sebesar 2,04 persen. Pergerakan ekonomi juga didukung oleh mulai meningkatnya daya serap anggaran sektor pemerintah.

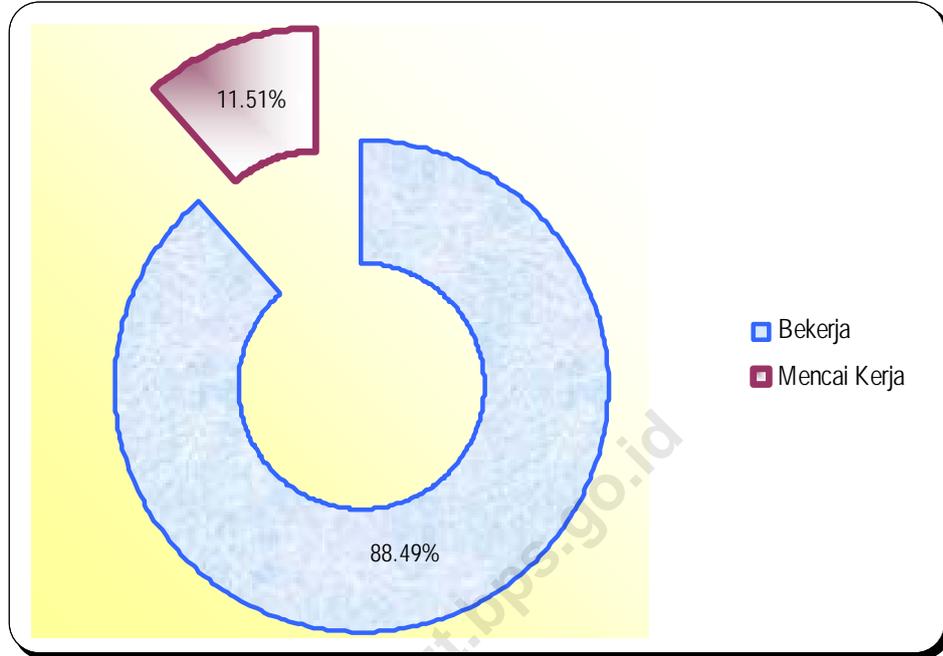
Pencapaian perekonomian Sumatera Utara sampai dengan semester pertama diperkirakan masih dibawah potensi yang sesungguhnya. Belum pulihnya sektor riil,

pemadaman listrik secara bergilir, masih tingginya BI *rate* serta para pemilik modal dan perbankan lebih menyukai investasi di pasar uang daripada investasi di sektor riil menghambat pergerakan ekonomi untuk mengurangi tingkat pengangguran.

<http://sumut.bps.go.id>

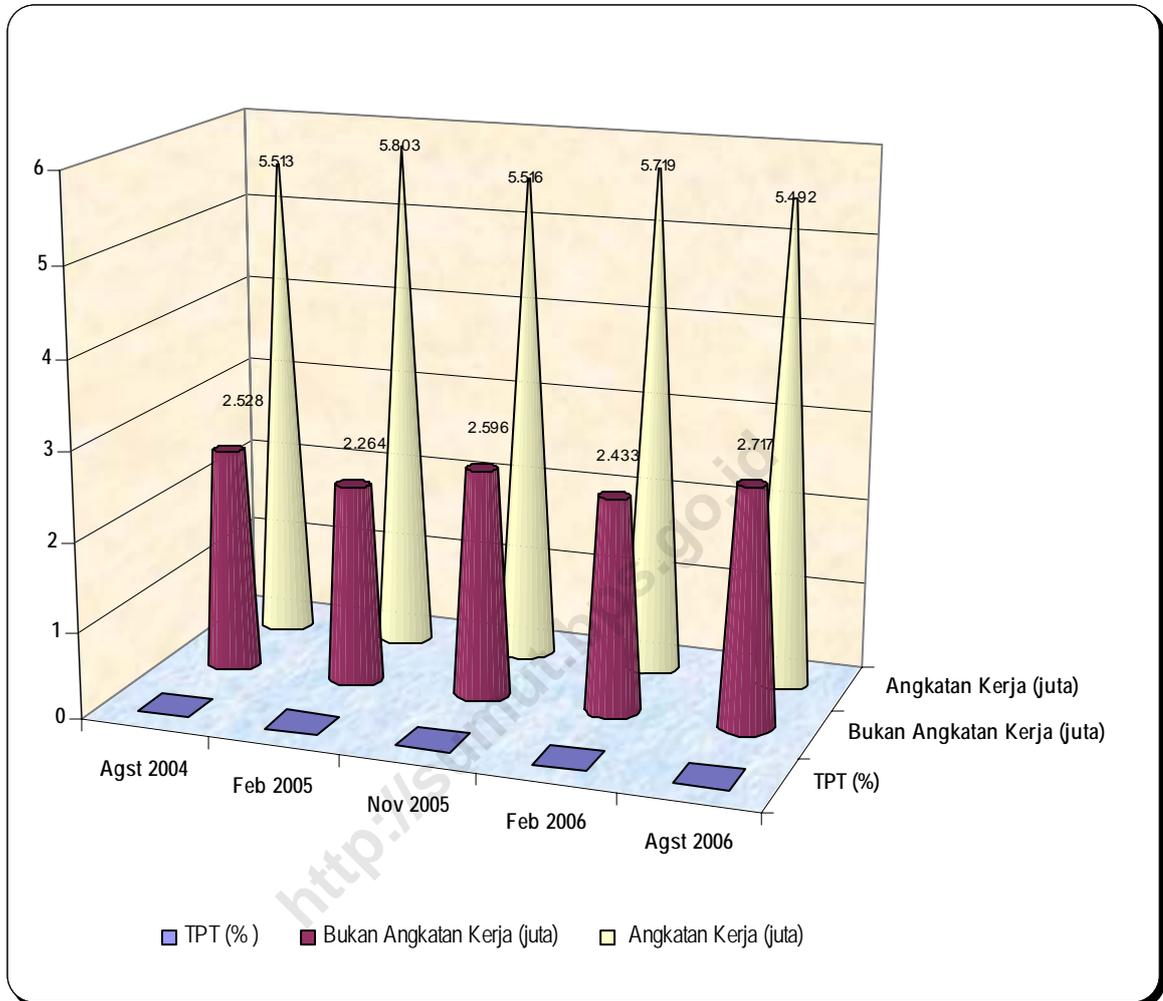
Grafik 2.1.a

Persentase Penduduk Bekerja dan Mencari Kerja Agustus 2006



Grafik 2.1.b

Persentase Penduduk Bekerja dan Mencari Kerja Agustus 2006



Tabel 2.1.
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama
Tahun 2004 - 2006

Rincian	2004	2005		2006	
	Agustus	Februari	November	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Penduduk Usia 15 tahun ke atas (juta)	8,041	8,067	8,112	8,152	8,209
2. Angkatan Kerja (juta)	5,513	5,803	5,516	5,719	5,492
a. Bekerja	4,902	5,166	4,859	4,871	4.860
b. Mencari Kerja	0,611	0,637	0,657	0,848	0.632
4. Bukan Angkatan Kerja (juta)	2,528	2,264	2,596	2,433	2,717
5. TPAK (%)	68,56	71,94	68,00	70,15	66,90
6. TPT (%)	11,08	10,98	11,90	14,82	11,51

3

KESEHATAN

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan cara pandang (mindset) dari paradigma sakit ke paradigma sehat, sejalan dengan visi Indonesia Sehat 2010.

3.1. Gizi Balita

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2005 dengan menggunakan analisis antropometri balita menyatakan bahwa sekitar 10,45 persen balita di Sumatera Utara berstatus gizi buruk. Dengan jumlah balita sebanyak 1.215.253 orang, maka diperkirakan sekitar 126.994 balita berada dalam kelompok yang dikhawatirkan menjadi *lost generation*.

Satu tingkat dibawah gizi buruk adalah gizi kurang yang jumlahnya mencapai 18,20 persen (sekitar 221.176 balita). Meskipun lebih dari 70 persen balita berstatus

gizi normal dan lebih, kelompok balita dengan status gizi buruk dan kurang perlu mendapat perhatian serius.

Dalam dua tahun terakhir penurunan persentase balita berstatus gizi buruk dan kurang di Propinsi Sumatera Utara cukup menggembirakan. Tahun 2004 sekitar 12,76 persen balita berstatus gizi buruk turun menjadi 10,45 persen pada tahun 2005. Demikian halnya balita berstatus gizi kurang turun menjadi 10,20 persen pada tahun 2005 dimana angka tahun 2004 mencapai 18,67 persen (Tabel 1).

Dua hal penting yang memicu terjadinya gizi buruk yaitu kemiskinan dan ketidaktahuan masyarakat. Karena miskin mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan bergizi, selain itu ada masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana memberi makanan bergizi pada anak dan keluarganya.

Sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan status gizi balita perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak bukan hanya pemerintah tetapi juga seluruh masyarakat.

Karena jika suatu daerah ingin berkembang dengan cepat, maka penduduknya harus berstatus gizi yang baik. Para ibu yang sehat dan cukup gizi akan melahirkan dan mendidik anak-anak yang sehat sehingga *lost generation* dapat dihindari.

Oleh karenanya program pembangunan yang mengarah kepada pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendidikan kesehatan masyarakat perlu lebih ditingkatkan.

3.2. Angka Kelahiran Total, Angka Kematian Bayi, dan Angka Harapan Hidup

Keberhasilan berbagai program yang berkaitan dengan kesehatan dan reproduksi wanita, memberi dampak pada penurunan angka kelahiran total / *Total Fertility Rate* (TFR) dan angka kematian bayi / *Infant Mortality Rate* (IMR) pada khususnya, dan derajat kesehatan penduduk pada umumnya.

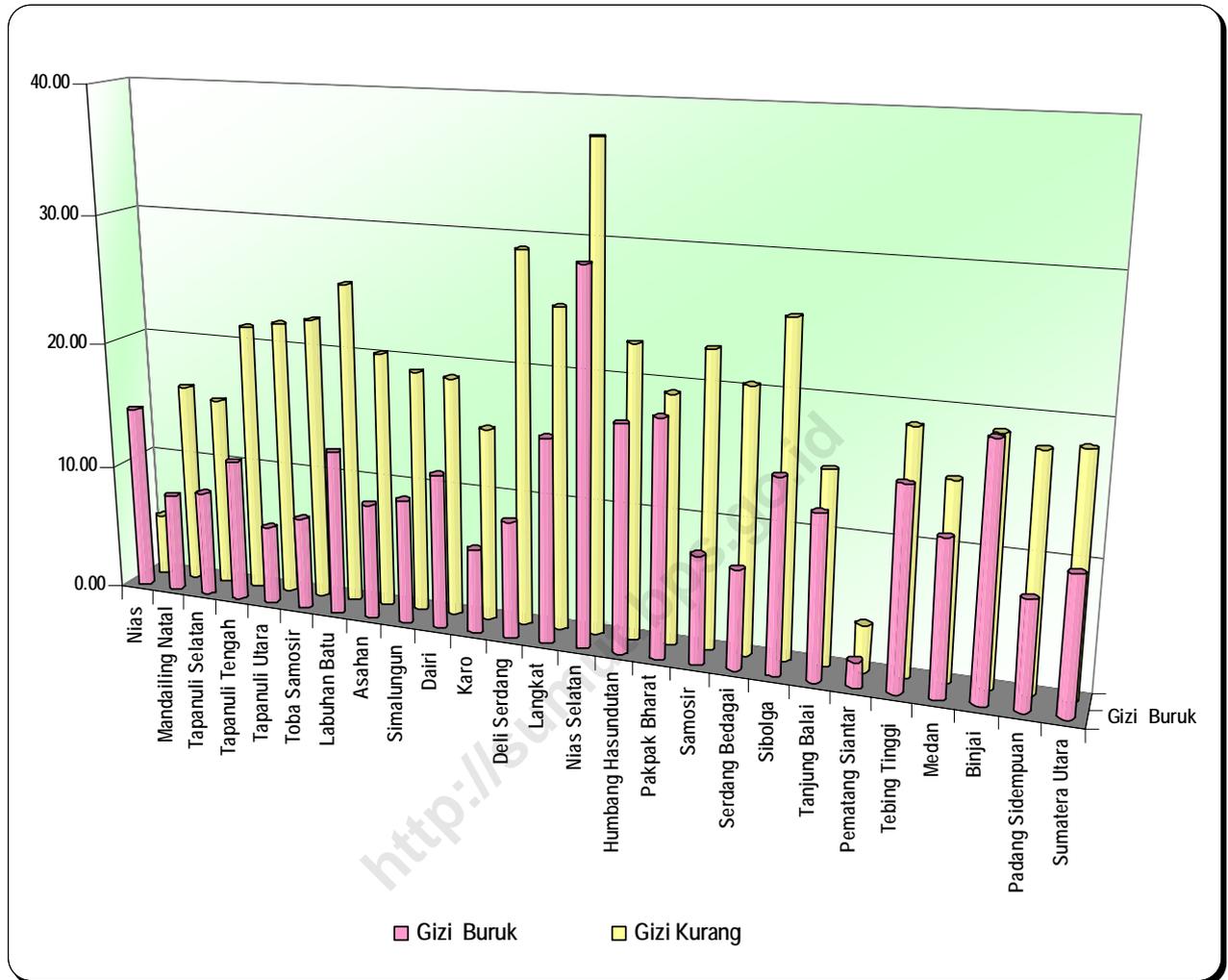
Penurunan angka kelahiran total (TFR) dari tahun 2004 sebesar 2,96 (mencapai 3 jiwa) menjadi 2,53 pada tahun 2005, hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah anak

yang dilahirkan selama masa reproduksinya telah semakin menurun. Makin rendahnya angka kelahiran mencerminkan bahwa upaya pemerintah dalam menekan angka kelahiran sudah mendekati harapan.

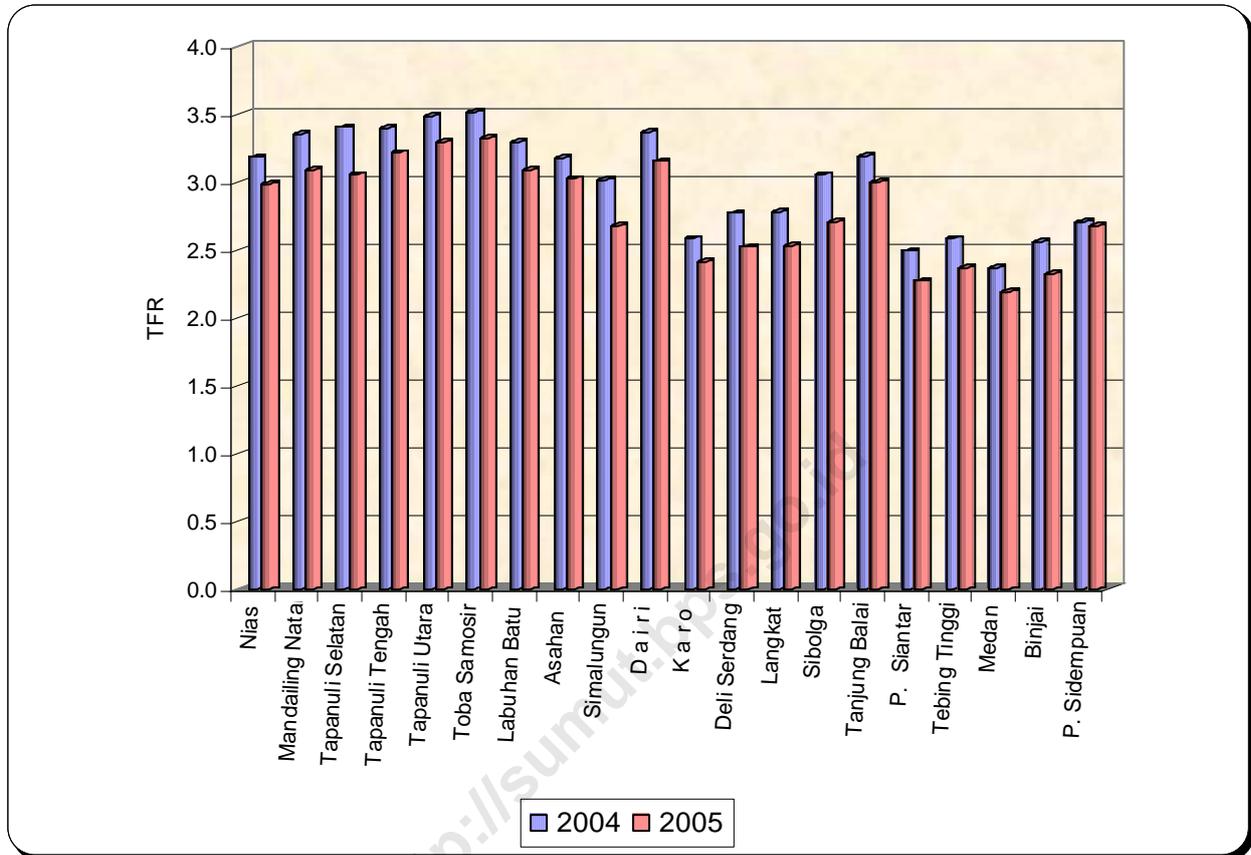
Rendahya tingkat kelahiran yang diikuti oleh rendahnya angka kematian bayi menunjukkan bahwa kualitas bayi yang dilahirkan semakin membaik dan program penanganan kesehatan pasca kelahiran semakin meningkat. Angka kematian bayi di Sumatera Utara pada tahun 2005 mencapai 22, berarti setiap 1000 kelahiran bayi terdapat 22 bayi yang meninggal. Kecilnya angka ini merupakan indikator untuk menentukan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Bayi yang dilahirkan sehat dan mendapat perawatan kesehatan dengan baik akan memberi peluang untuk bertahan hidup. Parameter demografi yang menunjukkan lamanya seseorang hidup dinyatakan dengan angka harapan hidup (e_0). Bayi yang lahir pada tahun 2005 diperkirakan akan dapat bertahan hidup selama 68,3 tahun. Angka ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan pada tahun 2004 yang lalu yang diperkirakan hanya mampu bertahan hidup selama 68,2 tahun. Angka harapan hidup yang juga merupakan salah satu komponen penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus diupayakan untuk ditingkatkan ditahun-tahun mendatang.

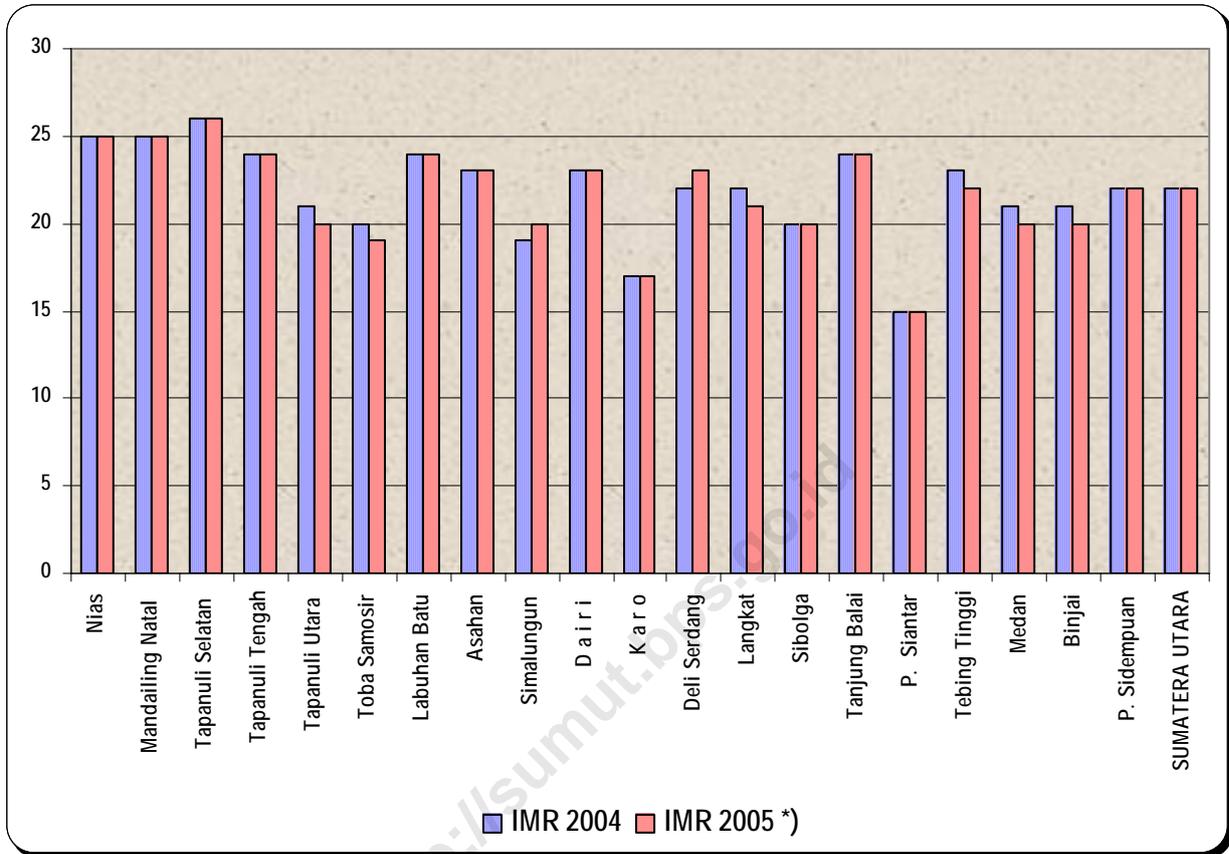
Grafik 3.1.
 Persentase Balita (0-59 Bulan) Menurut Status Gizi
 dan Kabupaten/Kota 2005



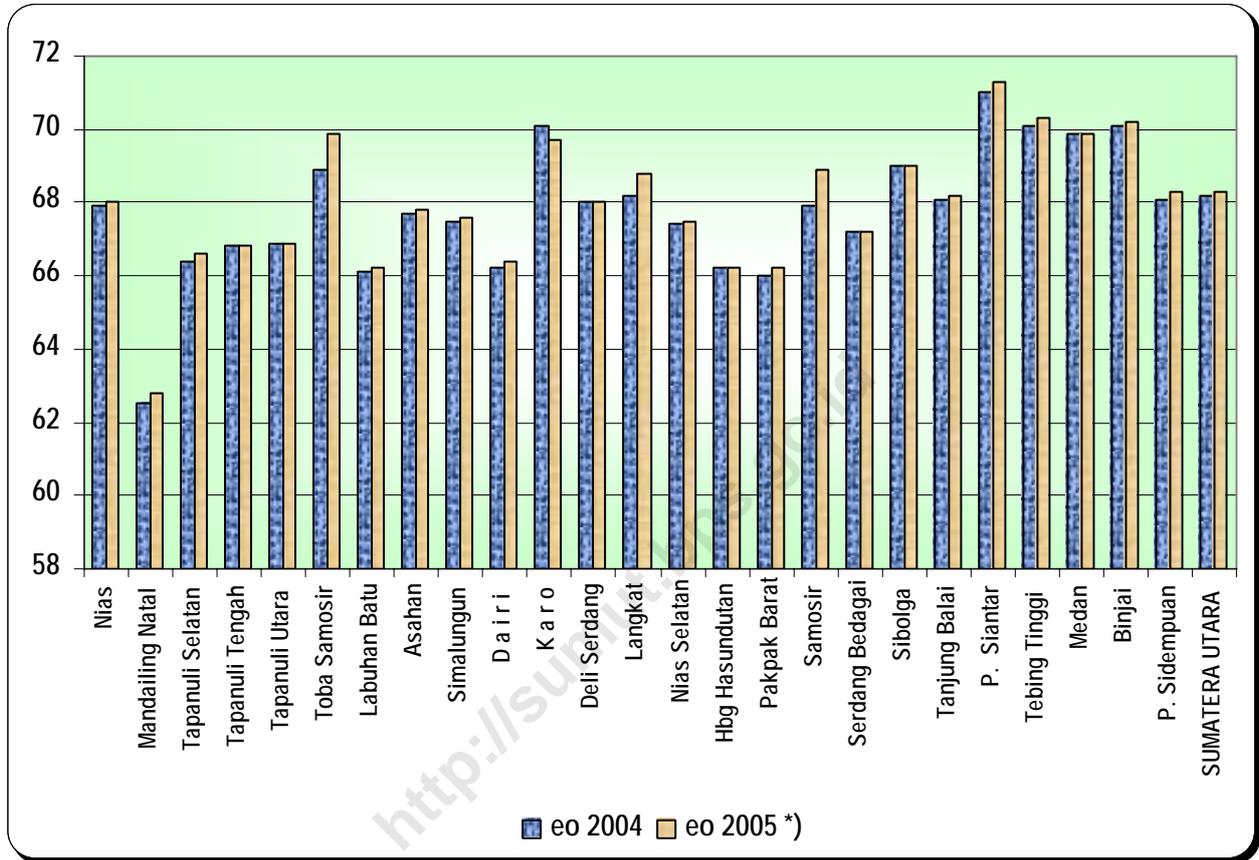
Grafik 3.2.
 Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi Sumatera Utara
 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004-2005



Grafik 3.3.
 Angka Kematian Bayi (IMR) di Provinsi Sumatera Utara
 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004-2005



Grafik 3.4.
 Angka Harapan Hidup (e_0) di Provinsi Sumatera Utara
 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004-2005



Tabel 3.1. Persentase Balita (0-59 Bulan) Menurut Status Gizi dan Kabupaten/Kota
2003, 2005

No	Kabupaten/kota	2003		2005	
		Gizi Buruk	Gizi Kurang	Gizi Buruk	Gizi Kurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Kabupaten:</i>				
1	Nias	15,50	20,16	14,63	4,88
2	Mandailing Natal	12,56	11,16	7,83	15,96
3	Tapanuli Selatan	1,58	16,60	8,37	15,14
4	Tapanuli Tengah	17,71	23,43	11,24	21,33
5	Tapanuli Utara	14,63	25,00	6,23	21,80
6	Toba Samosir	9,02	26,32	7,28	22,36
7	Labuhan Batu	18,93	19,82	12,99	25,32
8	Asahan	9,35	26,35	9,09	20,17
9	Simalungun	14,23	13,85	9,76	19,02
10	Dairi	19,09	16,18	12,08	18,79
11	Karo	11,43	10,95	6,56	15,16
12	Deli Serdang	11,80	23,31	9,11	28,93
13	Langkat	24,88	22,49	15,85	24,91
14	Nias Selatan	x	x	28,81	37,29
15	Humbang Hasundutan	x	x	17,53	22,71
16	Pakpak Bharat	x	x	18,27	19,23
17	Samosir	x	x	8,36	22,78
18	Serdang Bedagai	x	x	7,69	20,38
	<i>Kota:</i>				
71	Sibolga	12,61	9,66	14,89	25,53
72	Tanjung Balai	10,54	8,65	12,57	14,86
73	Pematang Siantar	2,98	12,77	1,99	3,59
74	Tebing Tinggi	4,27	11,11	15,35	18,60
75	Medan	16,00	25,25	11,89	15,05
76	Binjai	10,40	19,08	19,15	18,72
77	Padang Sidempuan	x	x	8,25	17,82
Sumatera Utara		12,76	18,67	10,45	18,20

Keterangan : x) Tergabung dengan Kabupaten Induk

Tabel 3.2.
Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi Sumatera Utara
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004-2005

Kabupaten/Kota	TFR	
	2004	2005 *)
[1]	[2]	[3]
01. Nias	3,18	2,98
02. Mandailing Natal	3,35	3,09
03. Tapanuli Selatan	3,40	3,05
04. Tapanuli Tengah	3,39	3,21
05. Tapanuli Utara	3,48	3,29
06. Toba Samosir	3,51	3,32
07. Labuhan Batu	3,29	3,09
08. Asahan	3,17	3,02
09. Simalungun	3,01	2,67
10. Dairi	3,36	3,15
11. Karo	2,58	2,41
12. Deli Serdang	2,77	2,52
13. Langkat	2,78	2,53
14. Nias Selatan	x	x
15. Humbang Hasundutan	x	x
16. Pakpak Barat	x	x
17. Samosir	x	x
18. Serdang Bedagai	x	x
71. Sibolga	3,05	2,70
72. Tanjung Balai	3,19	3,00
73. Pematang Siantar	2,49	2,27
74. Tebing Tinggi	2,58	2,37
75. Medan	2,37	2,19
76. Binjai	2,56	2,32
77. Padang Sidempuan	2,70	2,67
SUMATERA UTARA	2,96	2,53

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Keterangan : *) Angka Sementara

x) Tergabung dengan Kabupaten Induk

Tabel 3.3.
Angka Kematian Bayi (IMR) di Provinsi Sumatera Utara
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004-2005

Kabupaten/Kota	IMR	
	2004	2005 *)
[1]	[2]	[3]
01. Nias	25	25
02. Mandailing Natal	25	25
03. Tapanuli Selatan	26	26
04. Tapanuli Tengah	24	24
05. Tapanuli Utara	21	20
06. Toba Samosir	20	19
07. Labuhan Batu	24	24
08. Asahan	23	23
09. Simalungun	19	20
10. Dairi	23	23
11. Karo	17	17
12. Deli Serdang	22	23
13. Langkat	22	21
14. Nias Selatan	x	x
15. Humbang Hasundutan	x	x
16. Pakpak Barat	x	x
17. Samosir	x	x
18. Serdang Bedagai	x	x
71. Sibolga	20	20
72. Tanjung Balai	24	24
73. Pematang Siantar	15	15
74. Tebing Tinggi	23	22
75. Medan	21	20
76. Binjai	21	20
77. Padang Sidempuan	22	22
SUMATERA UTARA	22	22

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Keterangan : *) Angka Sementara

x) Tergabung dengan Kabupaten Induk

Tabel 3.4.
 Angka Harapan Hidup (e_0) di Provinsi Sumatera Utara
 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004-2005

Kabupaten/Kota	e_0	
	2004	2005 *)
[1]	[2]	[3]
01. Nias	67,9	68,0
02. Mandailing Natal	62,5	62,8
03. Tapanuli Selatan	66,4	66,6
04. Tapanuli Tengah	66,8	66,8
05. Tapanuli Utara	66,9	66,9
06. Toba Samosir	68,9	69,9
07. Labuhan Batu	66,1	66,2
08. Asahan	67,7	67,8
09. Simalungun	67,5	67,6
10. D a i r i	66,2	66,4
11. K a r o	70,1	69,7
12. Deli Serdang	68,0	68,0
13. Langkat	68,2	68,8
14. Nias Selatan	67,4	67,5
15. Humbang Hasundutan	66,2	66,2
16. Pakpak Barat	66,0	66,2
17. Samosir	67,9	68,9
18. Serdang Bedagai	67,2	67,2
71. Sibolga	69,0	69,0
72. Tanjung Balai	68,1	68,2
73. Pematang Siantar	71,0	71,3
74. Tebing Tinggi	70,1	70,3
75. Medan	69,9	69,9
76. Binjai	70,1	70,2
77. Padang Sidempuan	68,1	68,3
SUMATERA UTARA	68,2	68,3

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Keterangan : *) Angka Harapan Hidup Dari IPM

4

PENDIDIKAN

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lebih lanjut dalam Batang Tubuh UUD 1945 diamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara seperti yang tertuang dalam Pasal 28B Ayat (1) yaitu bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek aksara digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal,

nasional, dan global. Pembangunan pendidikan Sumatera Utara yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2004 – 2009 harus mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the right of child*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs) serta *World Summit on Sustainable Development* yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial.

4.1. Dinamika Pendidikan Sumatera Utara

Target MDG adalah menjamin bahwa sampai dengan 2015, semua anak, di mana pun, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar. Target itu sejalan dengan target Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yaitu meningkatkan partisipasi pendidikan dasar dengan indikator kinerja pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SLTP/MTs mencapai 90 persen persen paling lambat pada 2008, dan meningkatkan mutu pendidikan dasar yang pada saat ini masih di bawah standar nasional.

Program wajib belajar 9 tahun yang telah dideklarasikan Presiden pada tahun 1994 belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan, hal ini terlihat dari jumlah penduduk usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang masih berada di bangku sekolah masih 96,77 persen. Dibandingkan pada tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar 0,08 persen. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil persentase penduduk yang mengecap pendidikan tersebut.

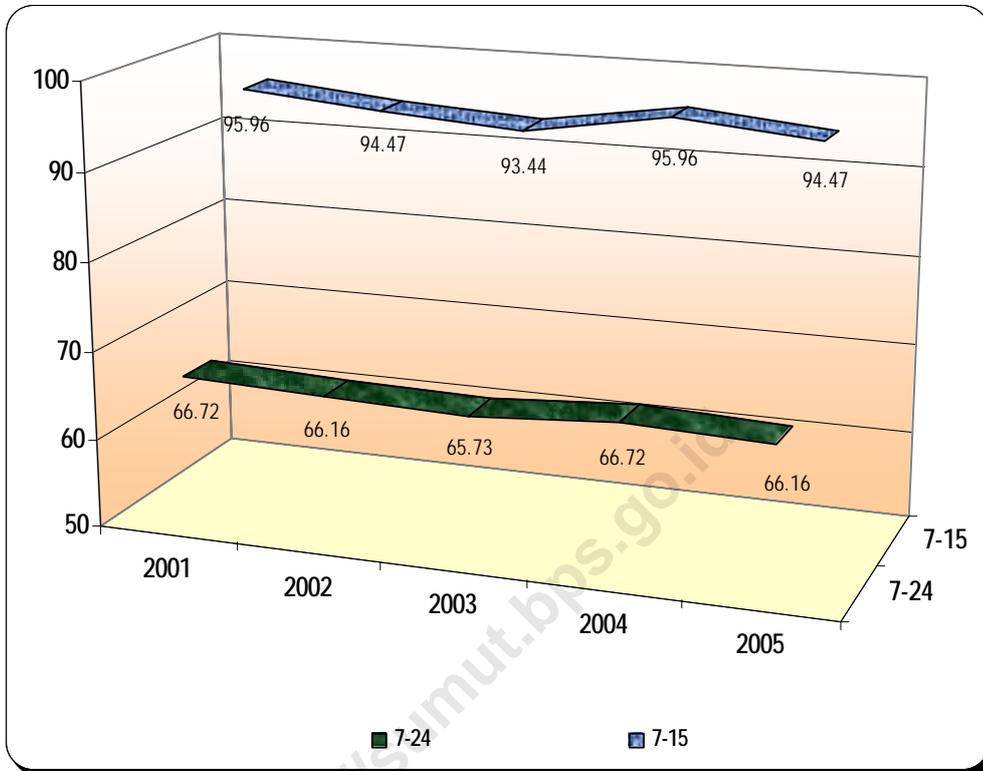
Persentase penduduk kelompok wajib belajar (7-15 tahun) yang masih bersekolah hanya 94,47 persen. Dilihat dari Kabupaten/Kota persentase terendah ada di Kabupaten Nias Selatan (87,76 %), diikuti oleh Kabupaten Tapanuli Tengah (90,66 %) dan Kabupaten Nias (91,04 %).

Disamping itu disajikan pula angka buta huruf penduduk usia 10 tahun keatas. Angka buta huruf ini mengindikasikan tingkat kebutuhan, kebijakan dan upaya dalam mengorganisasi program melek huruf dewasa dan kualitas pendidikan dasar.

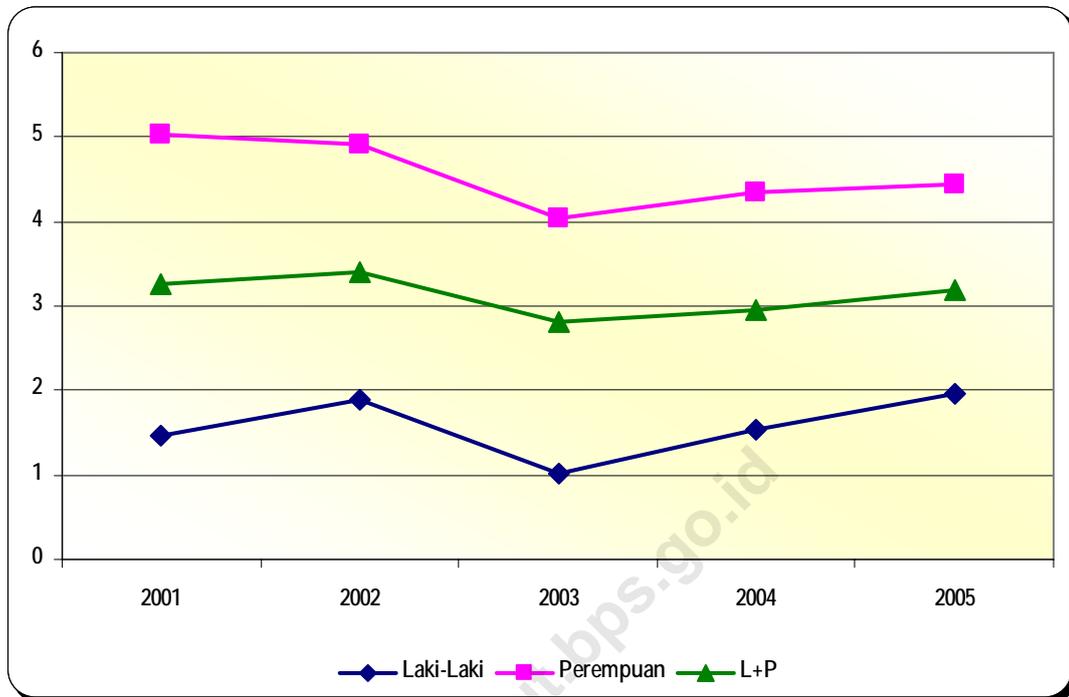
Angka buta huruf di Sumatera Utara sebesar 3,20 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2004 yaitu 2,95 persen. Ditinjau berdasarkan Kabupaten/Kota, angka buta huruf tertinggi terdapat di Kabupaten Nias Selatan (32,37 %), disusul oleh Kabupaten Nias (12,28 %) dan Kabupaten Humbang Hasundutan (4,55 %), sementara wilayah dengan angka buta huruf terendah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan 0,41 persen disusul oleh Kota Sibolga 0,43 persen dan Kota Pematang Siantar 0,56 persen.

<http://sumut.bps.go.id>

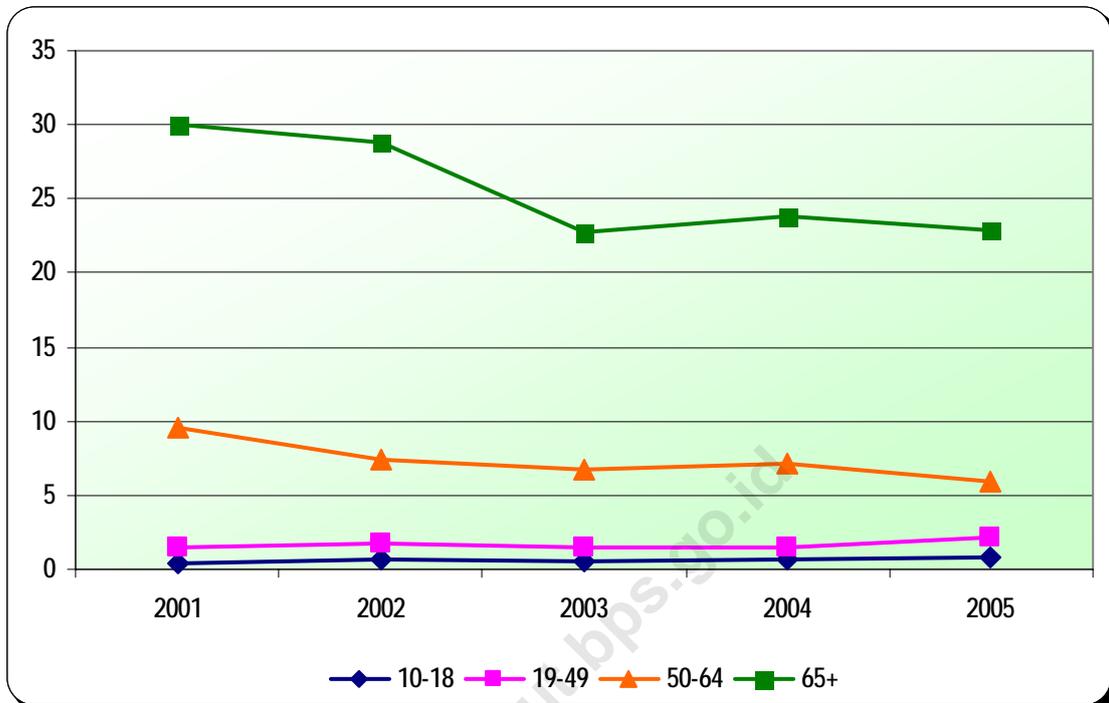
Grafik 4.1.
 Persentase Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur
 Provinsi Sumatera Utara 2001-2005



Grafik 4.2.
 Persentase Penduduk 10 + Yang Buta Huruf
 Provinsi Sumatera Utara Menurut Jenis Kelamin 2001-2005



Grafik 4.3.
Persentase Penduduk 10 + Yang Buta Huruf
Provinsi Sumatera Utara Menurut Kelompok Umur 2001-2005



Tabel 4.1.
 Persentase Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota
 dan Kelompok Umur Provinsi Sumatera Utara
 2001-2005

KABUPATEN /KOTA	LAKI-LAKI+PEREMPUAN					
	7-12	13-15	16-18	19-24	7-15	7-24
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
01. Nias	93,99	83,66	49,75	12,67	91.04	63.23
02. Mand. Natal	97,61	89,25	58,73	5,23	94.85	68.79
03. Tap. Selatan	98,82	94,03	76,09	19,50	97.29	75.84
04. Tap. Tengah	93,95	83,58	66,53	7,90	90.66	68.16
05. Tap. Utara	97,95	95,37	80,29	12,79	97.11	76.46
06. Toba Samosir	97,53	98,83	79,27	11,57	98.02	78.92
07. Labuhan Batu	98,05	86,53	63,31	8,80	94.48	67.33
08. Asahan	95,54	83,31	58,69	7,87	91.32	61.74
09. Simalungun	96,42	93,47	65,33	10,25	95.43	67.95
10. Dairi	95,40	89,41	65,69	11,01	93.51	72.34
11. Karo	96,16	91,13	72,32	8,25	94.65	70.17
12. Deli Serdang	97,84	92,03	61,28	11,51	95.92	64.66
13. Langkat	95,37	81,61	42,16	4,46	90.77	56.87
14. Nias Selatan	92,03	78,44	39,68	6,85	87.76	57.45
15. Hbg Hasundutan	96,44	95,46	87,74	11,95	96.08	75.99
16. Pakpak Bharat	96,12	90,91	60,94	9,63	94.48	69.40
17. Samosir	98,67	98,52	93,93	14,35	98.62	82.29
18. Serdang Bedagai	96,01	84,74	50,57	7,96	92.55	57.70
71. Sibolga	96,79	91,85	74,76	8,92	95.16	65.60
72. Tanjung Balai	94,56	85,18	54,95	8,30	91.36	59.66
73. P. Siantar	99,36	96,37	77,78	15,41	98.22	71.22
74. Tebing Tinggi	95,58	88,95	65,61	10,21	93.45	64.75
75. Medan	98,12	95,04	78,11	23,27	97.16	66.89
76. Binjai	97,68	90,99	69,14	15,46	95.72	64.40
77. P. Sidempuan	93,87	95,20	78,52	22,00	94.31	71.45
SUMUT (2005)	96,77	89,68	64,67	12,90	94.47	66.16
2004	97,64	90,28	66,42	11,75	95.96	66.72
2003	98,25	88,51	63,19	12,20	93.44	65.73
2002	96,96	87,32	62,49	13,61	94.47	66.16
2001	97,72	89,19	63,67	13,61	95.96	66.72

Sumber : SUSENAS 2001-2005, BPS Propinsi Sumatera Utara

Tabel 4.2.
Persentase Penduduk 10 + Yang Buta Huruf Provinsi Sumatera Utara Menurut
Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
2001-2005

KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK 10 + YANG BUTA HURUF			PENDUDUK BUTA HURUF MENURUT KELOMPOK UMUR			
	Laki-Laki	Perempuan	L+P	10-18	19-49	50-64	65+
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
01. Nias	9,00	15,69	12,28	3,70	11,50	27,65	55,53
02. Mand. Natal	1,39	1,23	1,31	0,30	1,17	0,79	10,41
03. Tap. Selatan	0,24	0,57	0,41	0,12	0,15	0,40	7,00
04. Tap. Tengah	2,34	4,97	3,64	2,24	2,24	4,44	26,22
05. Tap. Utara	1,90	5,09	3,54	1,10	1,44	3,23	20,56
06. Toba Samosir	0,83	2,37	1,62	0,29	0,90	1,64	11,00
07. Labuhan Batu	2,59	4,37	3,49	1,52	2,79	7,92	15,92
08. Asahan	1,59	5,61	3,59	0,40	1,70	9,78	28,35
09. Simalungun	1,17	4,40	2,79	0,47	1,55	3,53	24,62
10. D a l r i	1,53	3,11	2,31	0,47	1,09	4,97	16,36
11. K a r o	1,53	2,70	2,14	0,50	0,68	1,73	20,48
12. D. Serdang	0,73	4,11	2,40	0,08	1,02	5,42	30,75
13. Langkat	2,12	5,31	3,70	0,87	1,07	6,34	42,44
14. Nias Selatan	26,33	38,43	32,37	10,86	35,70	66,32	72,50
15. Humbang Has.	2,18	6,92	4,55	1,58	1,73	7,78	24,59
16. Pakpak Bharat	0,79	4,61	2,61	0,43	0,93	9,29	22,64
17. Samosir	0,59	5,10	2,90	0,14	0,78	4,18	30,09
18. Serdang Bedagai	1,53	4,17	2,87	0,40	1,56	6,31	22,02
71. Sibolga	0,28	0,59	0,43	0,17	0,16	0,91	7,02
72. Tanjung Balai	0,47	2,28	1,36	0,32	0,55	3,73	15,83
73. Pem. Siantar	0,19	0,92	0,56	0,18	0,42	0,36	3,82
74. Tebing Tinggi	0,56	2,13	1,35	0,18	0,40	2,80	17,20
75. Medan	0,18	1,04	0,62	0,13	0,22	0,54	9,59
76. Binjai	1,09	1,94	1,52	0,21	0,30	0,58	21,63
77. P.Sidempuan	0,53	1,35	0,95	0,61	0,45	1,64	8,63
SUMUT (2005)	1,95	4,44	3,20	0,87	2,12	5,90	22,83
2004	1,54	4,34	2,95	0,73	1,46	7,16	23,81
2003	1,02	4,04	2,80	0,60	1,48	6,72	22,70
2002	1,90	4,91	3,40	0,74	1,79	7,42	28,75
2001	1,46	5,03	3,25	0,40	1,42	9,56	29,98

Sumber : SUSENAS 2001-2005, BPS Propinsi Sumatera Utara

5

INFRASTRUKTUR

Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi bangsa dan penyediaannya merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, infrastruktur mempunyai peran yang tak kalah penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jaringan transportasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke serta Sangir Talaud ke Rote merupakan salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak lama infrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan. Dapat dikatakan disparitas kesejahteraan antarkawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi di antaranya. Dalam konteks ini, ke depan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka isolasi wilayah, serta ketersediaan pengairan merupakan prasyarat kesuksesan pembangunan pertanian dan sektor-sektor lainnya.

Di sisi lain, kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi, ketenagalistrikan, energi, pos, telekomunikasi dan informatika,

sumberdaya air, serta perumahan, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan, mengalami penurunan baik kuantitas maupun kualitasnya. Berkurangnya kualitas dan pelayanan dan tertundanya pembangunan infrastruktur baru dapat menghambat laju pembangunan nasional. Rehabilitasi dan pembangunan kembali berbagai infrastruktur yang rusak, serta peningkatan kapasitas dan fasilitas baru akan menyerap biaya yang sangat besar sehingga tidak dapat dipikul oleh pemerintah sendiri. Untuk itu, mencari solusi inovatif guna menanggulangi masalah perawatan dan perbaikan infrastruktur yang rusak merupakan masalah yang mendesak untuk diselesaikan.

Di bidang infrastruktur masih banyak kegiatan non cost recovery yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, antara lain dalam pembangunan jalan, fasilitas keselamatan transportasi, sumber daya air, fasilitas persampahan dan sanitasi. Pada kegiatan lain peran pemerintah melalui penyertaan modal negara kepada BUMN terkait yang bergerak di infrastruktur antara lain: jalan tol, pelabuhan, bandara, air minum, perumahan, pos, listrik, dan telekomunikasi, yang belum sepenuhnya sistem tarif yang berlaku menarik bagi investor swasta. Kegiatan-kegiatan ini terutama yang berkaitan dengan *public service obligation*/ PSO. Di sisi lain telah pula terdapat kegiatan yang sepenuhnya dapat dilakukan oleh swasta, seperti pembangkit listrik, telekomunikasi di daerah perkotaan, pelabuhan peti kemas, bandara internasional dan bandara pada lokasi tujuan wisata, jalan tol pada ruas-ruas yang memiliki kondisi lalu lintas yang tinggi.

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas pada 5 tahun ke depan perlu dipertegas penanganan kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi, dan pembangunan infrastruktur. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan PSO menjadi kewajiban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan oleh pemerintah. Untuk ini perlu adanya sinkronisasi penanganan program melalui APBN dan APBD.

5.1. Transportasi dan Komunikasi

Angkutan Darat

Jalan merupakan parasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar dan mendorong kegiatan perekonomian. Makin meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Panjang jalan di seluruh Sumatera Utara pada tahun 2005 mencapai 33.963,17 km yang terbagi atas jalan negara 2.098,05 km, jalan provinsi 2.752,50 km dan jalan kabupaten/kota 29.112,617 km. Untuk memenuhi transportasi darat, tersedia dua jenis kendaraan angkutan darat utama, yaitu kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 2005 jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar sebanyak 2.285.404 unit atau naik 16,74 persen dibandingkan tahun 2004, sebanyak 1.957.703 unit.

Angkutan Udara

Lalu lintas penerbangan dibedakan atas lalu lintas penerbangan dalam negeri dan lalu lintas penerbangan luar negeri. Lalu lintas penerbangan dalam negeri pada tahun 2005 tercatat pesawat yang berangkat sebanyak 22.993 unit dan pesawat yang datang 23.041 unit. Sedangkan jumlah penerbangan luar negeri yang datang dan berangkat tercatat masing-masing 4.821 dan 4.808 penerbangan.

Pos dan telekomunikasi

Pembangunan pos dan telekomunikasi mencakup jangkauan baik pelayanan dan peningkatan kerjasama internasional maupun peningkatan jasa telekomunikasi dan informasi, sehingga arus berita, informasi dan data berjalan lancar. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk memperlancar pelayanan berkenaan semakin meningkatnya permintaan akan jasa pos. Salah satu diantaranya dengan memperbanyak jumlah kantor pelayanan pos. Pengiriman surat kilat dari Sumatera Utara tahun 2005 mencapai tercatat 1.475.090 buah, sementara jumlah surat yang masuk pada periode yang sama sebanyak 1.484.154 buah.

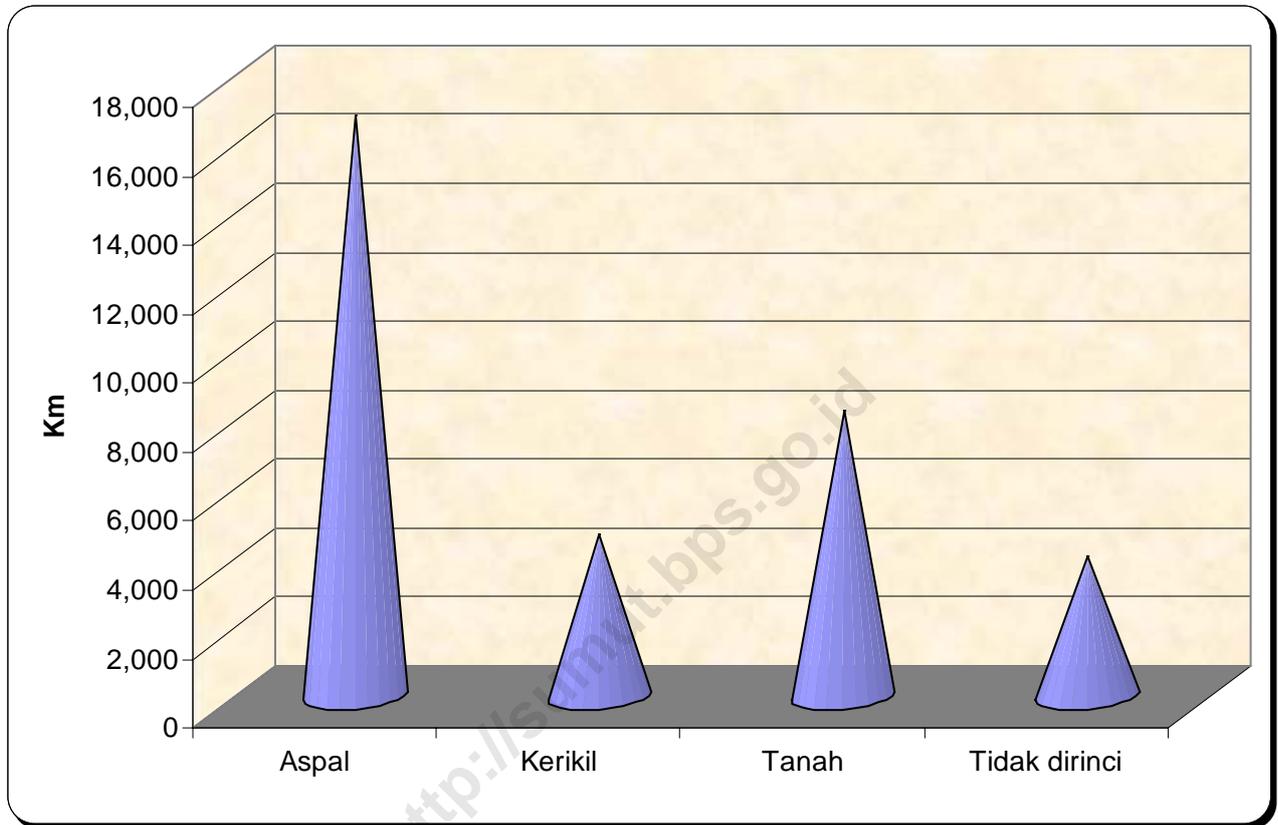
5.2. Listrik, Gas dan Air Minum

Sebagian besar kebutuhan tenaga listrik di Sumatera Utara dipenuhi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan sebagian lainnya dipenuhi oleh listrik non PLN. Selama periode tahun 2004 -2005 terjadi sedikit penambahan pembangkit listrik PLN untuk wilayah Sumatera Utara yakni sebesar 2,58 MW, dimana pada tahun 2004 daya yang terpasang sebesar 1296,94 MW meningkat menjadi 1.299,54 MW pada tahun 2005. Jumlah listrik yang diproduksi (dibangkitkan sendiri, dan dibeli) oleh PLN Kit Sumbagut pada tahun 2005 sebesar 6.343,77 GWH. Kemudian energi listrik tersebut didistribusikan oleh PLN Kit Sumbagut ke PLN Wilayah Sumatera Utara sebesar 5.472,96 GWH. Pada tahun 2005 jumlah energi listrik yang dijual PLN Wilayah Sumut kepada konsumen di Sumatera Utara sebanyak 2.129.471 pelanggan adalah sebesar 4.613,38 GWH.

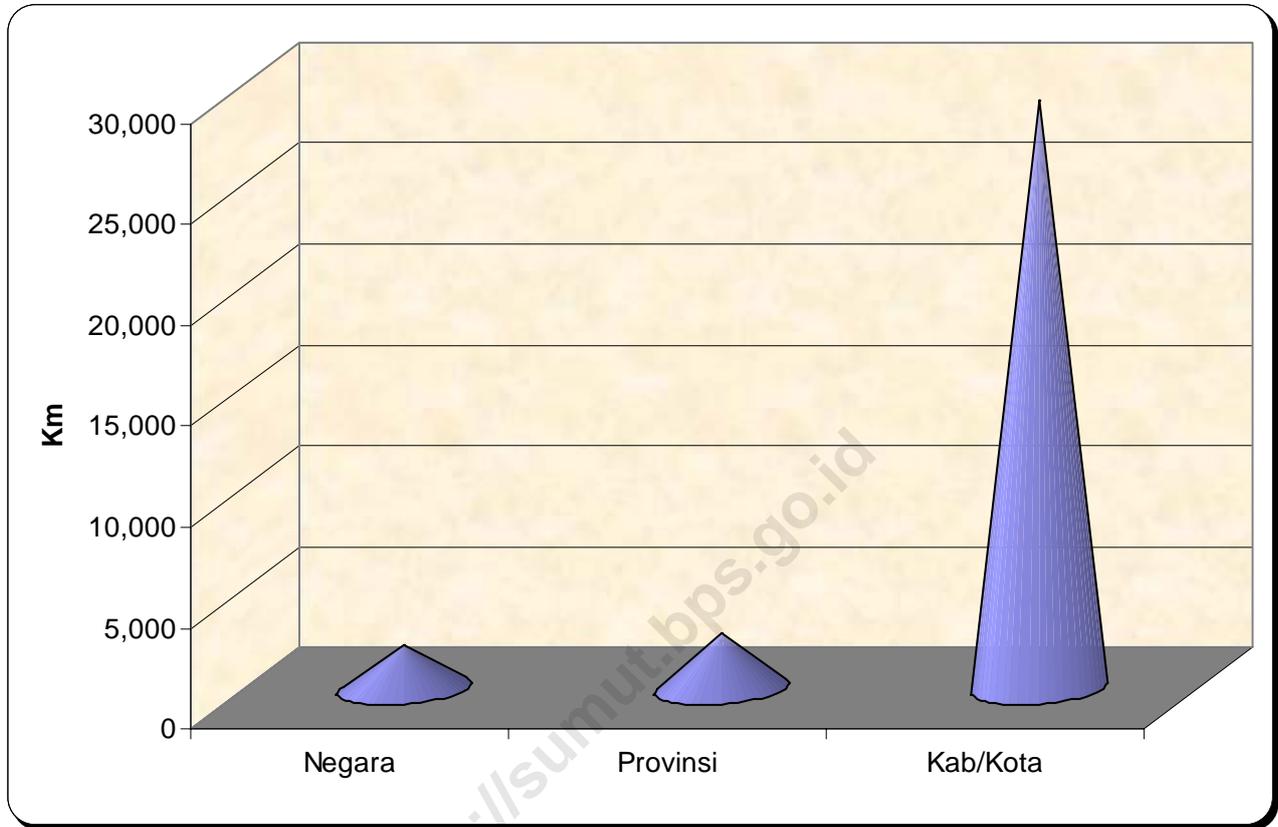
Konsumen Gas Kota di wilayah Sumatera Utara sampai saat ini hanya di Kota Medan saja yakni sebanyak 17.715 pelanggan pada tahun 2005. Volume gas kota yang disalurkan pada tahun 2005 sebesar 196,02 juta m³ dengan nilai penjualan sebesar 336,37 Milyar rupiah. Bila dibandingkan dengan tahun 2004 penjualan gas kota terjadi peningkatan sebesar 17,17 %, dimana pada volume gas yang dijual sebesar 167,29 juta m³ dengan nilai sebesar 241,52 milyar rupiah.

Air bersih yang disalurkan PDAM Sumatera Utara selama tahun 2004 - 2005 meningkat sebesar 4,64 %. Jika dibandingkan pada tahun 2004 air yang dijual kepada konsumen sebesar 166,38 juta m³ menjadi 174,10 juta m³ pada tahun 2005 dengan nilai penjualan sebesar 245,43 Milyar rupiah. Jumlah air bersih yang disalurkan PDAM kepada konsumen terbesar adalah Kota Medan yakni sebesar 108,34 juta m³ atau sebesar 62,23 % dari total air yang dijual di Sumatera Utara dengan nilai penjualan sebesar 171,74 Milyar rupiah.

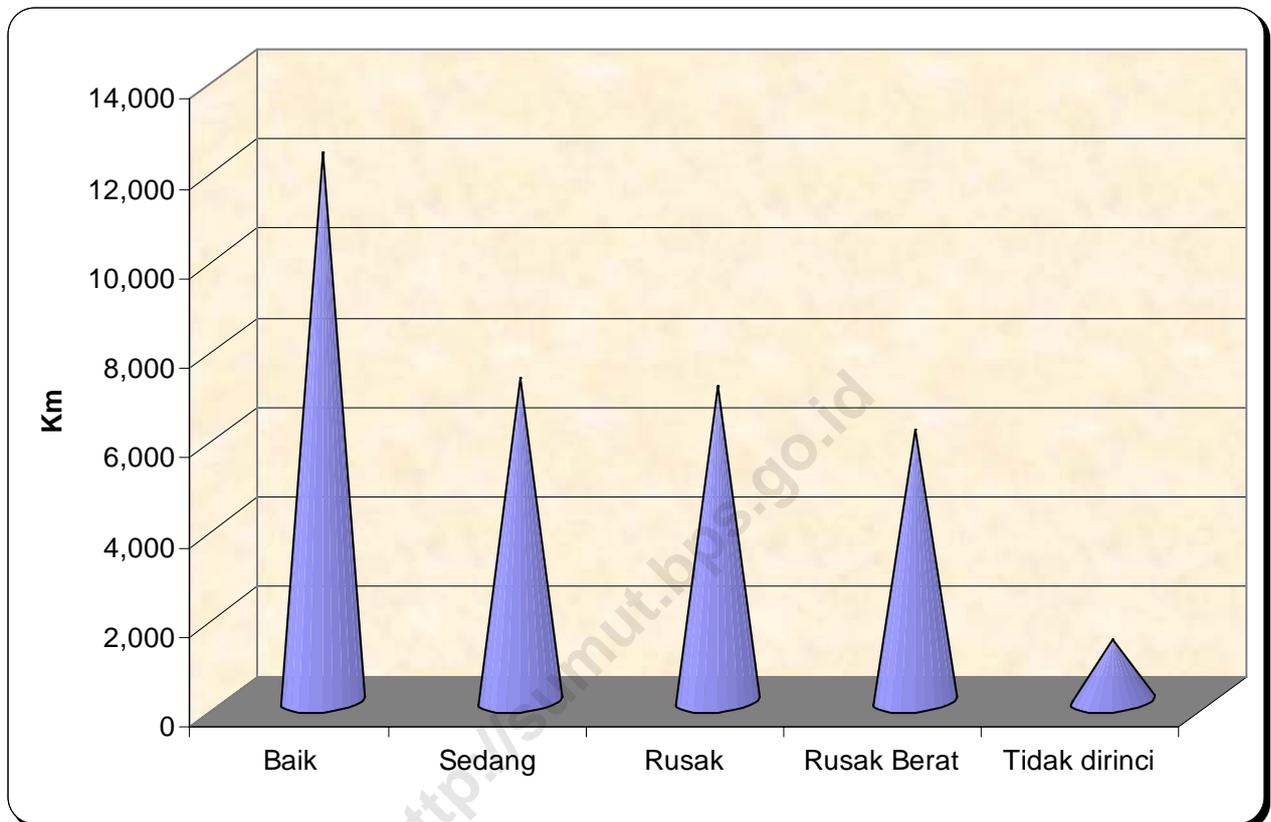
Grafik 5.1.
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005
(Km)



Grafik 5.2.
Panjang Jalan Menurut Jenis Status
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005
(Km)



Grafik 5.3.
Panjang Jalan Menurut Kondisi
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005
(Km)



Tabel 5.1.
Panjang Jalan Menurut Status, Jenis Permukaan dan Kondisi
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005
(Km)

Keadaan	Negara	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Jenis Permukaan	2 098,05	2 752,50	29 112,62	33 963,17
- Diaspal	2 068,05	2 648,61	12 148,26	16 864,92
- Kerikil	20	71,76	4 640,25	4 732,01
- Tanah	10	32,13	8 243,55	8 285,68
- Tidak Dirinci	-	-	4 080,56	4 080,56
II. Kondisi	2 098,05	2 752,50	29 112,62	33 963,17
- Baik	1 435,08	1 783,29	9 040,91	12 259,28
- Sedang	382,42	590,73	6 227,94	7 201,09
- Rusak	244,61	309,97	6 473,71	7 028,29
- Rusak Berat	35,94	68,51	5 977,00	6 081,45
- Tidak Dirinci	-	-	1 393,06	1 393,06

Sumber : Dinas Jalan dan Jembatan Kabupaten/Kota

Tabel 5.2.
Panjang Jalan Menurut Status, dan Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005
(Km)

Kabupaten/Kota	Status Jalan			Jumlah
	Negara	Provinsi	Kab/Kota	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Nias	-	426,990	2 617,480	3 044,470
02. Mandailing Natal	100,940	232,330	1 162,560	1 495,830
03. Tapanuli Selatan	91,300	687,060	2 695,150	3 473,510
04. Tapanuli Tengah	25,420	200,960	790,270	1 016,650
05. Tapanuli Utara	165,820	227,400	1 932,800	2 326,020
06. Toba Samosir	81,980	239,700	1 692,400	2 014,080
07. Labuhan Batu	153,880	221,100	1 773,684	2 148,664
08. Asahan	138,690	165,660	1 733,600	2 037,950
09. Simalungun	77,110	243,770	1 983,900	2 304,780
10. Dairi*)	108,670	93,760	1 794,940	1 997,370
11. Karo	56,140	141,130	1 087,640	1 284,910
12. Deli Serdang	211,230	302,300	4 871,680	5 385,210
13. Langkat	94,770	164,040	1 514,750	1 773,560
14. Nias Selatan ¹⁾	-	-	-	-
15. Hbg Hasundutan ¹⁾	-	-	-	-
16. Pakpak Bharat ¹⁾	-	-	-	-
17. Samosir ¹⁾	-	-	-	-
18. Serdang Bedagai ¹⁾	-	-	-	-
19. Sibolga	-	-	52,620	52,620
20. Tanjung Balai	-	-	218,115	218,115
21. P. Siantar	-	-	294,046	294,046
22. Tebing Tinggi	-	-	166,360	166,360
23. Medan	-	-	2 951,380	2 951,380
24. Binjai	-	-	335,088	335,088
25. P. Sidempuan	-	-	351,496	351,496

Sumber : Dinas Jalan dan Jembatan Kabupaten /Kota

Keterangan : *) Data 2002

¹⁾ Masih Bergabung dengan Kabupaten Induk (Nias, Taput, Dairi, Tapsel, Deli Serdang, Toba Samosir)

6

KINERJA PEREKONOMIAN

Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, misalnya antara permintaan domestik dengan keluaran nasional, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi. Hubungan tersebut tidak selalu harus dalam keseimbangan yang sangat tepat. Ketidakseimbangan fiskal dan neraca pembayaran misalnya tetap sejalan dengan stabilitas ekonomi asalkan dapat dibiayai secara berkesinambungan.

Perekonomian yang tidak stabil menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan masyarakat. Ketidakstabilan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga, untuk menyusun rencana ke depan, khususnya dalam jangka lebih panjang yang dibutuhkan bagi investasi. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi panjang. Adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan keluaran produksi akan mengurangi tingkat keahlian tenaga kerja yang lama menganggur. Inflasi yang tinggi dan fluktuasi yang tinggi menimbulkan biaya yang sangat besar kepada masyarakat. Beban terberat akibat inflasi yang tinggi akan dirasakan oleh penduduk miskin yang mengalami penurunan daya beli. Inflasi yang berfluktuasi tinggi menyulitkan pembedaan pergerakan harga yang disebabkan oleh perubahan permintaan atau penawaran barang dan jasa dari kenaikan umum harga-

harga yang disebabkan oleh permintaan yang berlebih. Akibatnya terjadi alokasi inefisiensi sumber daya.

Mengingat pentingnya stabilitas ekonomi makro bagi kelancaran dan pencapaian sasaran pembangunan nasional, Pemerintah bertekad untuk terus menciptakan dan memantapkan stabilitas ekonomi makro. Salah satu arah kerangka ekonomi makro dalam jangka menengah adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan mencegah timbulnya fluktuasi yang berlebihan di dalam perekonomian.

Stabilitas ekonomi makro tidak hanya tergantung pada pengelolaan besaran ekonomi makro semata, tetapi juga tergantung kepada struktur pasar dan sektor-sektor. Untuk memantapkan stabilitas ekonomi makro, kebijakan ekonomi makro, melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi baik, harus didukung oleh kebijakan reformasi struktural, yang ditujukan untuk memperkuat dan memperbaiki fungsi pasar, antara lain pasar modal dan uang, pasar tenaga kerja serta pasar barang dan jasa, dan sektor-sektor meliputi seperti sektor industri, pertanian, perdagangan, keuangan dan perbankan.

6.1. Inflasi

Pada tahun 2005, Sumatera Utara mengalami inflasi sebesar 22,41 persen, jauh lebih tinggi daripada tahun 2004 yang hanya mencapai sebesar 6,80 persen. Inflasi tahun 2005 tersebut juga lebih tinggi dari inflasi Nasional yang mencapai 17,11 persen.

Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan (60,59 persen), diikuti oleh kelompok bahan makanan (23,83 persen), kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (16,92 persen), kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (11,75 persen), kelompok sandang (8,70 persen), kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga (5,00 persen) dan kelompok kesehatan (4,66 persen).

6.2. Perdagangan Luar Negeri

Pada sisi lain, perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2005 juga ditandai dengan meningkatnya kegiatan ekspor impor. Pada tahun 2004 surplus perdagangan mencapai 3,29 milyar USD. Sampai dengan Nopember 2005 surplus perdagangan Sumatera Utara telah mencapai 3,38 milyar USD.

Nilai ekspor Sumatera Utara sebagian besar (72,91 persen) berasal dari sektor industri, sedangkan dari sektor pertanian sebesar 26,79 persen. Sementara barang impor yang paling banyak berupa bahan baku/penolong yang mencapai 55,89 persen, diikuti oleh barang konsumsi 23,51 persen.

6.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pergerakan perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2005 diwarnai oleh pembangunan kembali daerah bencana pasca Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, dan kenaikan harga BBM pada bulan Maret dan Oktober 2005.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2005 lebih rendah dibandingkan dengan keadaan tahun 2004. Dari hasil perhitungan sangat sementara, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2005 mencapai 5,48 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun ini lebih rendah dari tahun 2004 yang mencapai 5,74 persen, ataupun dari pertumbuhan yang dicapai pada tahun 1997 (kondisi terakhir sebelum krisis ekonomi) yang sebesar 5,70 persen. Bahkan, lebih rendah dari pertumbuhan nasional yang mencapai 5,60 persen.

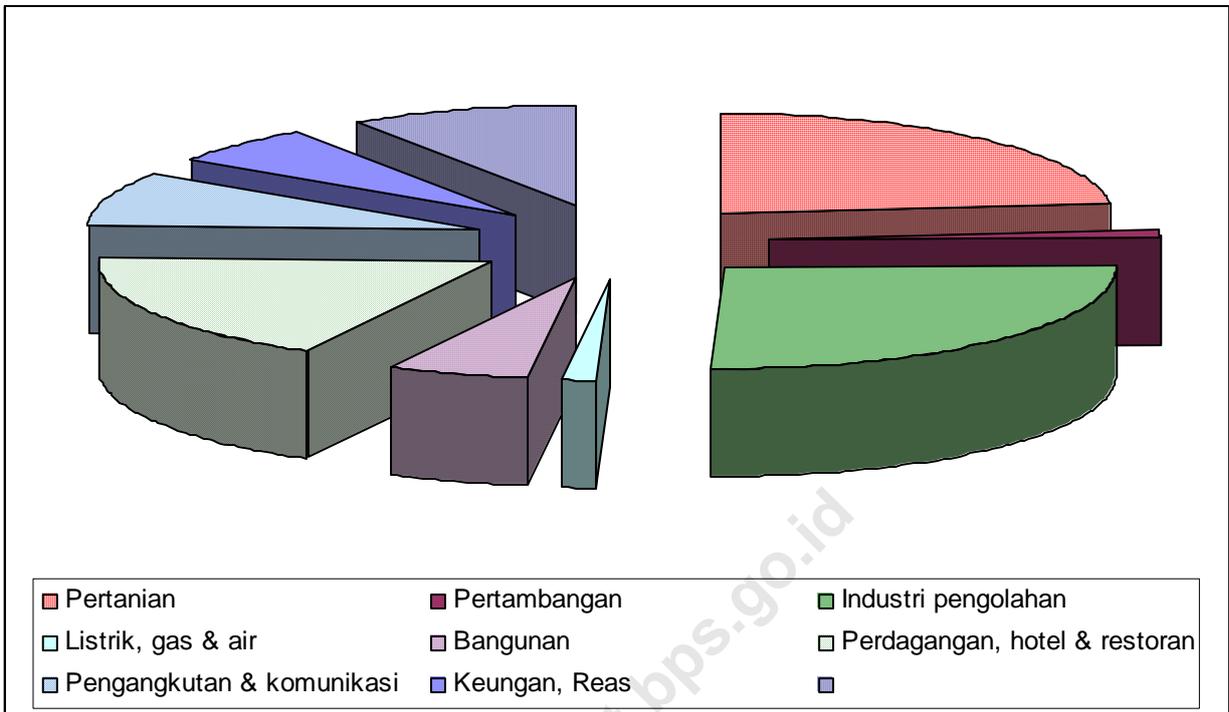
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara atas dasar harga berlaku menunjukkan, bahwa perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2005 umumnya digerakkan oleh sektor pertanian dimana peranannya mencapai 24,69 persen, sedangkan industri pengolahan hanya menyumbang 24,72 persen.

Akan tetapi, lebih dari separuh (50,76 persen) PDRB provinsi Sumatera Utara digunakan untuk memenuhi konsumsi rumahtangga, yaitu makanan (30,63 persen dan non makanan 21,09 persen). Sedangkan penggunaan PDRB untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 18,56 persen.

Walaupun pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara di tahun 2005 lebih rendah dari tahun 2004, PDRB Perkapita ADHB Sumatera Utara tahun 2005 berhasil mencapai 11,106 juta rupiah, lebih tinggi dari tahun 2004 yang sebesar 9,74 juta rupiah

Untuk dipahami bersama, pada tahun 2005, telah dilakukan pergeseran tahun dasar perhitungan PDRB dengan mengganti tahun 1993 menjadi tahun 2000. Hal ini dilakukan didasarkan atas pertimbangan perkembangan ekonomi dunia dalam kurun waktu 1993-2000 yang diwarnai oleh globalisasi yang berpengaruh kepada perekonomian domestik. Dalam periode yang sama, juga telah terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997, yang berdampak pada perubahan struktur perekonomian Indonesia. Disamping itu, ketersediaan data (*raw data*) baik harga maupun volume (*quantum*) tahun 2000 secara rinci pada masing-masing sektor ekonomi relatif lebih lengkap dan berkelanjutan dibandingkan kondisi pada tahun 1993.

Grafik 6.1
Struktur Perekonomian Sumatera Utara Tahun 2005



Tabel 6.1
Indikator Makro Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2004-2005

No.	Indikator	Satuan	Keadaan 2004*	Keadaan 2005**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pertumbuhan Ekonomi			
	▪ Nasional	Persen	5,05	5,60
	▪ Sumatera Utara	Persen	5,74	5,48
2.	PDRB-Berlaku	Triliun Rp.	118,10	136,90
3.	PDRB-Konstan 2000	Triliun Rp.	83,33	87,89
4.	PDRB Perkapita Harga Berlaku	Juta Rp.	118,10	136,90
5.	Struktur Ekonomi			
	- Pertanian, Peternakan, Kehutanan, & Perikanan	Persen	24,47	23,44
	- Pertambangan & Penggalian	Persen	1,17	1,25
	- Industri Pengolahan	Persen	25,36	25,97
	- Listrik, Gas & Air Bersih	Persen	1,26	1,26
	- Bangunan	Persen	5,70	5,94
	- Perdagangan, Hotel & Restoran	Persen	18,51	18,09
	- Pengangkutan & Komunikasi	Persen	8,03	8,61
	- Keuangan, Real Estat & Jasa Perush	Persen	6,09	6,10
	- Jasa-jasa	Persen	9,42	9,33

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat sementara

Tabel 6.2
 Indikator Perdagangan Luar Negeri,
 Nilai Tukar Petani (NTP), dan Inflasi Sumatera Utara
 2004-2005

No.	Indikator	Satuan	Keadaan 2004	Keadaan 2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Volume Ekspor	Juta Ton	7,51	8,17
2.	Nilai Ekspor	Milyar US\$	4,24	4,56
3.	Volume Impor	Juta Ton	3,22	3,72
4.	Nilai Impor	Milyar US\$	0,95	1,18
5.	NTP	Persen	100,8	101,0
6.	Inflasi			
	▪ Medan	Persen	6,64	22,64
	▪ P. Siantar	Persen	7,31	19,67
	▪ Sibolga	Persen	6,64	22,39
	▪ P. Sidempuan	Persen	8,99	18,47
	▪ Sumatera Utara	Persen	6,80	22,41
	▪ Nasional	Persen	6,40	17,11

Sumber: BPS Propinsi Sumatera Utara



**KONDISI MAKRO SOSIAL EKONOMI
PROVINSI SUMATERA UTARA 2003-2004
DAN KONDISI YANG DIHARAPKAN 2005-2009**



**INDIKATOR MAKRO EKONOMI SUMATERA UTARA 2003-2005
DAN KONDISI YANG DIHARAPKAN 2006-2009**

No	Indikator	Satuan	Keadaan 2003*	Keadaan 2004**	Kondisi Yang diHarapkan				
					2005 ^{e)}	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,81	5,74	5,48	6,49	7,02	7,54	7,79
2.	PDRB-Berlaku	Triliun Rp	103,4	118,10	136,90	152,70	175,26	202,19	234,31
3.	PDRB Konstan 2000	Triliun Rp	78,81	83,33	87,89	94,02	100,62	108,20	116,62
4.	PDRB Perkapita Harga Berlaku	Juta Rp	8,67	9,74	11,11	12,11	13,73	15,66	17,93
5.	Struktur Ekonomi								
	- Pertanian	%	24,94	24,47	23,44	23,42	23,14	22,92	22,91
	- Pertambangan dan Penggalian	%	1,18	1,17	1,25	1,16	1,14	1,12	1,09
	- Ind. Pengolahan	%	25,27	25,36	25,97	25,03	25,14	25,33	25,41
	- Listrik, Gas, dan Air Bersih	%	1,29	1,26	1,26	1,45	1,47	1,47	1,46
	- Bangunan	%	5,48	5,70	5,94	5,61	5,59	5,63	5,62
	- Perdagangan, Hotel dan Restoran	%	18,48	18,51	18,09	18,84	18,90	18,98	19,00
	- Pengangkutan dan Komunikasi	%	7,83	8,03	8,61	8,96	9,28	9,39	9,65
	- Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	%	5,99	6,09	6,10	6,12	6,09	6,06	6,00
	- Jasa- Jasa	%	9,54	9,42	9,34	9,41	9,25	9,10	8,86
6.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Investasi)	Triliun Rp.	-	-	-	28,58	34,78	42,25	49,73
7.	Volume Ekspor	Juta Ton	5,49	7,51	7,61	8,00	8,39	8,79	9,08
8.	Nilai Ekspor	Milyar US\$	2,69	4,24	4,34	4,37	4,45	4,58	4,93
9.	Volume impor	Juta Ton	2,34	3,22	3,53	3,63	3,74	3,84	3,94
10.	Nilai Impor	Milyar US\$	0,68	0,95	1,54	1,58	1,63	1,67	1,72
11.	NTP	-	100,8	101,0	102,50	102,50	103,00	103,00	103,50
12.	Inflasi	%	4,23	6,80	7,00	7,00	6,50	6,50	6,00

Keterangan/Catatan :

*) Angka Proyeksi ini merupakan hasil penghitungan yang didasarkan PDRB Seri Baru yang menggunakan Thn Dasar 2004, angka ini berbeda dengan hasil proyeksi sebelumnya yang menggunakan penghitungan PDRB Seri Lama yang menggunakan Tahun Dasar 2003.

- 1). Pertanian (Agriculture) meliputi : Tanaman Bahan Makanan, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan.
- 2). Industri (Manufacture) meliputi : Pertambangan & penggalian; industri pengolahan, listrik, gas & air serta bangunan
- 3). Jasa-jasa (services) meliputi : Perdagangan, Hotel dan Restoran; pengangkutan dan komunikasi, keuangan serta jasa-jasa lainnya.

**INDIKATOR MAKRO KEPENDUDUKAN SUMATERA UTARA 2003-2005
DAN KONDISI YANG DIHARAPKAN 2006-2009**

No	Indikator	Satuan	Keadaan 2003*	Keadaan 2004**	Kondisi Yang diHarapkan				
					2005 ^{e)}	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jumlah Penduduk	Ribu jiwa	11.890	12.123	12,411	12.605,7	12.760,7	12.914,6	13.066,6
2.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	15,89	14,93	14,10	13,00	12,70	11,40	10,0
3.	Persentase Tingkat Kesakitan	Persen	16,62	19,19	18,00	17,00	16,00	15,50	15,00
4.	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,0	68,2	68,5	70,86	71,17	71,48	71,79
5.	Total Fertility Rate (TFR)	Rata-rata kelahiran PUS	3,03	2,96	2,84	2,78	2,45	2,41	2,40
6.	Infant Mortality Rate (IMR)	Per 1000 kelahiran hidup	37,0	36,7	36,4	25,72	24,59	23,52	22,49
7.	IPM	-	69,8	70,3	70,8	71,4	72,0	72,7	73,4
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Penduduk umur 15 tahun keatas) (Metode Baru)	Persen	12,34	13,75	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00
9.	Tingkat Melek Huruf	Persen	97,20	97,05	97,30	97,45	97,50	97,55	97,60
10.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,6	9,0	9,0	9,2	9,4	9,6	9,8
11.	Rumah tangga yg mendapat layanan listrik	Persen	86,01	86,78	87,20	87,70	88,10	88,60	89,00
12.	Rumah tangga menurut sumber air minum ledeng dan air dalam kemasan	Persen	24,61	23,41	24,00	24,50	25,00	25,50	26,00

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

e) Data tahun 2006-2010 merupakan angka proyeksi yang dipakai Pemerintah secara resmi, hasil penghitungan kerjasama Bappenas, BPS dan UNFPA Indonesia